

2.1 Capaian Kinerja Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dan tahun sebelumnya didasarkan pada data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun indikator kinerja makro Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023 dan 2024

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,4	69,14	1,08%
2.	Angka Kemiskinan :			
	– Persentase Penduduk Miskin*	19,96%	19,48*	-2,40
	– Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)*	1,141	1,128*	0,013
3.	Angka Pengangguran / TPT (bulan Feburari)	3,14%	3.17%	0,03 %
4.	Pertumbuhan Ekonomi (y on y) (Data TW I)	3,52%	3,66	0,14%
5.	PDRB per Kapita ADHB (juta rupiah)	23,078	34,41	11,33
6.	Ketimpangan Pendapatan (gini ratio)*	0,325	0,315	-0,01%

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2024
*Kondisi Maret 2024

a. Indeks Pembangunan Manusia (PMI)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*alongand healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Sesuai standar *United Nations Development Programme* (UNDP) capaian IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dalam kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$), namun dalam satu dekade terakhir, pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mengalami kemajuan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat dari 68,4 pada tahun 2023 menjadi 69,14 pada Tahun 2024. Capaian IPM Tahun 2024 ini mengalami peningkatan 1,08 poin jika dibandingkan dengan IPM Tahun 2023. Peningkatan IPM 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Selengkapnya komponen-komponen penentu besaran IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut data BPS Provinsi NTT dirinci sebagai berikut :

1. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,83 tahun, meningkat 0,26 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).
2. Dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,22 menjadi 13,23 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,20 tahun, dari 7,82 tahun menjadi 8,02 tahun pada tahun 2024. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret.
3. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 286 ribu rupiah (3,47 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

b. Angka Kemiskinan

Perhitungan angka kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik didasarkan pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Ini berarti, perhitungan angka kemiskinan dilakukan melalui pengukuran terhadap kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, konsep penduduk miskin yang dipakai Badan Pusat Statistik adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan, di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 19,48%, turun 0,14% dibandingkan September 2023.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 1,13 juta orang, menurun 13,54 ribu orang terhadap Maret 2023. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 8,57 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 9,12 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin

perdesaan pada Maret 2024 sebesar 23,41 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 23,76 persen.

Dibanding Maret 2023, jumlah penduduk miskin Maret 2024 perkotaan menurun sebanyak 3,96 ribu orang (dari 135,57 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 131,61 ribu orang pada Maret 2024). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 9,59 ribu orang (dari 1.005,55 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 995,96 ribu orang pada Maret 2024).

Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp 527.275,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 403.922,- (76,61 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp123.353,- (23,39 persen). Pada Maret 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi NTT memiliki 5,75 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp3.031.831,-/rumah tangga miskin/bulan.

c. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Februari 2024 sebesar 3,17 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 orang penganggur. Pada Februari 2024, TPT mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2024 terkoreksi sedikit membaik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Februari 2024 sebesar 3,17 persen, naik sebesar 0,03 persen poin dibanding Agustus 2023.

Pada Februari 2024, TPT laki-laki sebesar 3,62 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 2,65 persen. TPT laki-laki memiliki pola yang sama dengan TPT provinsi yaitu naik dibandingkan Februari 2023 sebesar 0,59 persen poin, sedangkan TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 0,54 persen poin.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (6,38 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (2,06 persen). Dibandingkan Februari 2023, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,12 persen poin dan 0,02 persen poin.

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Februari 2024 mempunyai pola yang berbeda dengan

Februari 2023. Pada Februari 2024, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 7,66 persen. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan Diploma I/II/III, yaitu sebesar 0,53 persen. Dibandingkan Februari 2023, penurunan TPT terbesar terjadi pada yang berpendidikan Diploma I/II/III yaitu sebesar 3,91 persen poin. Sementara itu, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan mengalami kenaikan TPT tertinggi yaitu sebesar 1,23 persen poin.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2024 mencapai Rp34,41 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp19,52 triliun.

Ekonomi NTT triwulan III-2024 tumbuh sebesar 3,66 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 (y-on-y). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu sebesar 13,56 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 11,06 persen.

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi NTT pada triwulan III-2024 mengalami kontraksi sebesar 1,34 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 8,65 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 1,72 persen.

Perekonomian NTT pada triwulan I–III 2024 tumbuh sebesar 4,02 persen (c-to-c). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,54 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 13,19 persen.

Struktur Ekonomi NTT pada triwulan III-2024 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 28,76 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 66,23 persen.

e. PDRB Perkapita NTT Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2024 mencapai Rp 34,41 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp19,52 triliun.

Pertumbuhan ekonomi positif terjadi pada semua lapangan usaha. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan ini adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 13,56 persen, selanjutnya disusul oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 8,53 persen dan lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 8,04 persen.

Bila dilihat dari penciptaan pertumbuhan ekonomi NTT triwulan III-2024, tiga lapangan usaha dengan kontribusi tertinggi adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor yang menyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu sebesar 0,87 persen. Kemudian disusul oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 0,64 persen dan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,48 persen.

Struktur PDRB NTT menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan III-2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (66,23 persen) yang mencakup lebih dari separuh PDRB NTT. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB NTT secara berturut-turut adalah PMTB (44,67 persen), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (21,84 persen), Ekspor Barang dan Jasa (5,86 persen), dan Pengeluaran Konsumsi LNPRT (3,46 persen). Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 42,99 persen.

f. Ketimpangan Pendapatan

Pada September 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi NTT yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,3155. Angka ini menurun 0,0007 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,3162 dan menurun 0,0095 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,3250.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,282; naik dibanding Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,281 dan turun jika dibandingkan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,299.

Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,306; naik dibanding Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,305 dan turun jika

dibandingkan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,307.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 20,79 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 23,03 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 21,55 persen, yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah.

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

LAMPIRAN 2.2.2
2 (dua) Urusan

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	$\frac{\text{Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah}}{\text{Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{297.184}{302.964} \times 1000$ = 98,09%	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	$\frac{\text{Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus}}{\text{Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{3.261}{7.722} \times 1000$ = 42,23%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	
2	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang di lestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang ditetapkan}} \times 100\%$	$\frac{74}{31} \times 1000$ = 238,71%	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Kesehatan, Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh Provinsi}}{\text{Jumlah Penduduk Provinsi}} \times 100\%$	$\frac{6.273}{5.700.772} \times 1000$ = 1,100%	Data Seksi Yankes Rujukan Tahun 2024	
		2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS Provinsi}} \times 100\%$	$\frac{60}{66} \times 1000$ = 90,90%	Data Seksi Yankes Rujukan Tahun 2024	
		3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	$\frac{\text{Jumlah Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama}} \times 100\%$	$\frac{31.963}{31.993} \times 1000$ = 99,90%	Data Seksi Yankes Rujukan Tahun 2024	
		4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	$\frac{\text{Jumlah orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB}} \times 100\%$	$\frac{3.949.459}{3.949.459} \times 1000$ = 100%	Laporan KLB Data Seksi Survim Tahun 2024	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Pekerjaan Umum
2. Perumahan Rakyat
3. Pertanahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pekerjaan Umum	1	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur Pengendalian Banjir	Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Provinsi (ha) -----x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Provinsi (ha)	Tidak Ada	Dinas PUPR	Surat keterangan
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi (m) -----X 100 % Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Provinsi (m)	Tidak Ada	Dinas PUPR	Surat keterangan
		3	Rasio luas Daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha) di tahun eksisting -----X 100 % Luas Daerah irigasi kewenangan Provinsi	913,40 ha -----x1000 60,328 ha = 1,51%	Dinas PUPR	Belum ada bukti dukung
		4	Presentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan	Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota -----X 100 % Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang	384,966 m³ -----x1000 622,080 m³	BLUD SPAM Dinas PUPR	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten./kota	memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/Kota di Provinsi bersangkutan	= 61,88%		
		5	Rasio pelayanan pengelolaan limbah domestik oleh SPAL Regional	Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik regional -----X 100 % Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik regional	Tidak Ada	Dinas PUPR Prov. NTT	Surat keterangan
		6	Rasio Kemantapan Jalan	Panjang jalan kewenangan Provinsi yang mantap -----X 100 % Panjang jalan keseluruhan di wilayah Provinsi	1.827,07 km -----x1000 2.687,31km = 67,99%	Dinas PUPR Prov. NTT	Belum ada bukti dukung
		7	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli -----X100% Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi	1.442 orang -----x1000 1.936 orang = 74,48%	Dinas PUPR Prov. NTT	Data dukung belum benar
2	Perumahan Rakyat	1	Presentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun N -----X 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun N	Tidak Ada	Dinas PUPR Prov.	Surat keterangan
		2	Presentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + Rumah tangga penerima Subsidi Uang sewa + Rumah tangga penerima penyediaan Rumah layak huni (-) -----X 100 %	Tidak Ada	Dinas PUPR Prov.	Surat keterangan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan (-)			
		3	Presentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 ha yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh 10 -15 Ha yang ditangani (--)}}{\text{Luas Kawasan kumuh 10 – 15 Ha}} \times 100 \%$	0%	Dinas PUPR Prov.	Surat keterangan
		4	Persentase satuan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	$\frac{\text{Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah satuan Perumahan}} \times 100 \%$	Tidak Ada	Dinas PUPR Prov.	Surat keterangan
3	Pertanahan	1	Presentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)}} \times 100 \%$	0 %	Dinas PUPR Prov.	Izin Lokasi bukanlah kewenangan Dinas PUPR, Terkait table rumus, tidak terdapat kegiatan karena keterbatasan anggaran
		2	Presentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	$\frac{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu}}{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum}} \times 100 \%$	Tidak ada	Dinas PUPR Prov.	PUPR hanya melakukan penetapan lokasi
		3	Persentase ketersediaan Pembangunan lintas kabupaten/Kota	Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) lintas Kab/Kota	Tidak Ada	Dinas PUPR Prov.	Tidak terdapat kegiatan untuk pertanahan karena keterbatasan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				-----x 100 % Luas tanah di atas kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang diterbitkan			anggaran



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$	Sat Pol PP	Dari surat masuk, pengaduan operasi penertiban pemantauan dan pengamanan serta patroli
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	Sat Pol PP	Jumlah kasus yang diselesaikan sesuai pelanggaran Perda dan Perkada dan pelanggaran Perda dan Pergub



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Sosial Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Sosial

No	Urusan Pemerintahan	No	IKK Out Come	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sosial	1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Korban Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan di dalam panti ----- x 100% Populasi Disabilitas terlantar	40 ----- x 100% 40 = 100%	Dinas Sosial Provinsi NTT	
		2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Korban Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan di dalam panti ----- x 100% Populasi Anak terlantar	270 ----- x 100% 270 = 100%	Dinas Sosial Provinsi NTT	
		3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan di dalam panti ----- x 100% Populasi Lanjut Usia Terlantar	137 ----- x 100% 137 = 100%	Dinas Sosial Provinsi NTT	
		4.	persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan di dalam panti -----x 100% Populasi Gelandangan dan Pengemis	0 ---- x 100% 0 = 0%	Dinas Sosial Provinsi NTT	Surat Keterangan



No	Urusan Pemerintahan	No	IKK Out Come	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		5.	persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya -----x 100% Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	2.714 ----- x 100% 2.714 = 100%	Dinas Sosial Provinsi NTT	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Tenaga Kerja
2. Transmigrasi

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tenaga Kerja	1	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyusun rencana tenaga kerja -----x 100 % Jumlah Kabupaten /Kota	0 -----x 100 % 22 = 0 %	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Data terlampir
		2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi -----x 100 % Jumlah tenaga kerja keseluruhan	418 ----- X 100 % 3.024.462 = 0,01 %	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Data terlampir
		3	Tingkat Produktivitas tenaga kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) -----x 100% Jumlah tenaga kerja	78.044.565,32 -----x 100 3.024.462 = 2,580 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur skala upah, dan daftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak -----x100% Jumlah Perusahaan	142 -----x 100 % 29.005 = 0,49 %	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Data terlampir
		5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (Dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) daerah Provinsi	Jumlah pencari kerja (pencaker) yang ditempatkan -----x 100% Jumlah pencaker yang terdaftar	2.943 ----- x100 6.510 = 45,21 %	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Data terlampir



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	$\frac{\sum \text{Total Perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun n}}{\sum \text{Total Perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n}} \times 100\%$	1.210 -----x 100 % 29.005 = 4,17 %	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Data pendukung terlampir



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Keluarga Berencana

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di Provinsi}} \times 100\%$	$\frac{202.539.875.382}{4.322.313.687.267} \times 100\% = 4,68\%$	DP3AP2KB dan Badan Keuangan	
		2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani intensi tingkat provinsi yang didampingi}}{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 10.000$	$\frac{728}{1.792.963} \times 10.000 = 4.06$	DP3AP2KB dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data SIMFONI 2024
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan di Provinsi}} \times 100.000$	$\frac{633}{1.970.946} \times 100.000 = 32,11$	DP3AP2KB dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. NTT	Data SIMFONI 2024
2	Pengendalian Penduduk & KB	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i^f} \times k$	2,71	Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024 (PK 24)	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	$\frac{377838}{717667} \times 100\% = 52,65\%$	Sistem Informasi Keluarga BKKBN 2024	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani -----x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	$\frac{127795}{717667} \times 100\%$ = 17,81%	Sistem Informasi Keluarga BKKBN 2024	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Petanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Pertanian
2. Pangan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas Panen}} \times 100\%$	$\frac{1.356.241}{423.271} \times 100$ = 31,21 %	*Angka sangat sementara yang diolah data KSA BPS dan ePDPs Pusdatin	Perhitungan untuk tahun 2024 sementara berjalan, angka tetap akan keluar pad bulan Juni/Juli tahun 2025
2	Pangan	1	Persentase Cadangan Pangan	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan Pemerintah Provinsi}}{\text{Jumlah target cadangan pangan Pemerintah Provinsi yang ditetapkan}} \times 100\%$	$\frac{32,17}{261,15} \times 100$ = 9,96 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Peternakan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Peternakan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peternakan	1	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya}}{\text{jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$	$\frac{7.255 - 2.096}{2.096} \times 100\%$ = 40,63%	Data sekunder Dinas Peternakan Prov NTT	<ul style="list-style-type: none">Provinsi NTT masih dinyatakan bebas untuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta penyakit Lumpy Skin DiseaseTahun 2024 terdapat kasus AI di Kabupaten Ngada, hasil investigasi menyatakan bahwa adanya pemasukan unggas secara ilegal. Kasus ini sudah bisa dikendalikan dengan beberapa tindakan teknis yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Ngada diantaranya melakukan desinfeksi pada kandang/lokasi kasus, KIE kepada peternak dan masyarakat, pembatasan atau pelanggaran pengadaan ternak unggas/ayam pada kegiatan ketahanan pangan melalui dana desa



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Lingkungan Hidup
2. Kehutanan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	$\text{IKLH Prov} = (\text{IKA } 0,34) + (\text{IKU } 0,428) + (\text{IKL } 0,133) + (\text{IKAL } 0,099)$ IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan IKAL = Indeks Kualitas Air Laut	IKLH = 75	IKLH Kementerian Lingkungan Hidup	Belum ada publikasi perhitungan IKLH akhir Tahun 2024 oleh Kementerian Lingkungan Hidup, perhitungan IKLH saat sampai pada tahap klarifikasi. Setelah tahap klarifikasi, Tim pelaksana IKLH melakukan perhitungan akhir indeks, penyusunan IKLH pusat, provinsi dan kabupaten/kota
		2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi}}{\text{Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$	$\frac{83}{100} \times 100\% = 83\%$	Dinas LHK Prov. NTT	Pelanggaran dikarenakan tidak taat dalam penyampaian laporan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup (Penyampaian laporan setiap 6 bulan sekali)
2	Kehutanan	1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikan akses legal}}{\text{Jumlah total usulan KTH yang terintegrasi}} \times 100\%$	$\frac{312}{387} \times 100\% = 80,62\%$	Dinas LHK Provinsi NTT	
		2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	$\frac{\text{Jumlah hutan yang rusak}}{\text{Jumlah hutan keseluruhan}} \times 100\%$	$\frac{1.542.8034}{1.778.682.57} \times 100\% = 0,087\%$	Dinas LHK Prov. NTT	
		3	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	$\frac{\text{Lahan - lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha)}}{100\% \text{ Luas lahan kritis di Provinsi (ha)}} \times 100\%$	$\frac{1.110}{580.730,99} \times 100\% = 0,19\%$	Dinas LHK Prov. NTT	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Adm Kependudukan & Pencatatan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil	1	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	$\frac{\text{Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun}}{2 \text{ kali}} \times 100\%$	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	Data Dukcapil Provinsi NTT 2024	
		2	Pemanfaatan data kependudukan	$\frac{\text{OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama}}{\text{Seluruh OPD Provinsi}} \times 100\%$	$\frac{0}{5} \times 100\% = 0\%$	Data Dukcapil Provinsi NTT 2024	Syarat OPD dapat memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama maka OPD sudah memiliki sertifikat ISO 27001: 2013 dan memiliki jaringan VPN atau Jaringan Pribadi Virtual (<i>Virtual Private Network</i>)



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per awal tahun tahun n)}} \times 100\%$	$\frac{201}{986} \times 100\% = 20,39\%$	Indeks membangun Kemendes PDT	
		2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang per awal tahun tahun}} \times 100\%$	$\frac{1}{1.634} \times 100\% = 0,06 \%$	IDM Kemendes PDT	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Perhubungan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Perhubungan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perhubungan	1	Rasio konektivitas provinsi	<p>Rasio konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none">• IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut)• IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah linta Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhanlintas penyeberangan pada provinsi tersebut) <p>Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP• Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan	<p>Rasio Konektifitas :</p> <p>- IK1 (Angkutan Jalan) =</p> <p>a. Jumlah trayek yang dilayani sebanyak 113 trayek</p> <p>b. Bobot trayek = 1</p> <p>c. Jumlah Kebutuhan Trayek = 597 Trayek</p> <p>Perhitungannya sebagai berikut : $\frac{113 \times 1}{597} = 0,19$</p> <p>- IK2 (Angkutan Sungai, danau & Penyeberangan)</p> <p>a. Jumlah lintas penyeberangan = 71 lintasan</p> <p>b. Bobot Trayek = 0,5</p> <p>$\frac{71 \times 0,5}{104} = 0,24$</p> <p>- Bobot angkutan jalan = 70</p> <p>- Bobot ASDP = 30</p> <p>Jadi Rasio Konektifitas Provinsi adalah</p> <p>a. IK1 X 70 = $0,19 \times 70 = 13,3$</p> <p>b. IK2 X 30 =</p>	Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				<p>perintis ditambah lintasan komersil</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direnc. dalam kurun waktu tertentu <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) <p>Bobot Trayek atau Lintas :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 	$0,34 \times 30 = 10,28$ <p>Jadi Rasio Konektifitas Provinsi adalah sebagai berikut</p> $13,3 + 10,28 = 23,58\%$ <p>= 0,23</p>		



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5			
		2	V/C Ratio di Jalan Provinsi	V/C ratio di jalan Provinsi	Tidak ada		Surat Keterangan



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Komunikasi dan Informasi, Statistik & Persandian

No	Urusan Pemerintahan	No	IKK Outcame	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas KOMINFO}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	$\frac{36}{41} \times 100\% = 87,80\%$	Dinas KOMINFO/ Bidang Komunikasi & Informasi	
		2	Presentase layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah layanan public yang diselenggarakan secara online \& terintegrasi}}{\text{Jumlah layanan public}} \times 100\%$	$\frac{9}{36} \times 100\% = 87,80\%$	Dinas KOMINFO/ Bidang Komunikasi & Informasi	
		3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	$\frac{3.826.789}{3.874.577} \times 100\% = 87,80\%$	Dinas KOMINFO/ Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	



No	Urusan Pemerintahan	No	IKK Outcame	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
2	STATISTIK	1	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistic dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	$\frac{41}{41} \times 100\% = 100\%$	Dinas KOMINFO/ Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
		2	Presentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Dearah}} \times 100\%$	$\frac{41}{41} \times 100\% = 100\%$	Dinas KOMINFO/ Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
3	PERSANDIAN	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah provinsi	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$	$\frac{479}{645} \times 100\% = 74,26\%$	Dinas KOMINFO/Bidang Persandian	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Koperasi, dan UKM Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Presentase Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dab aset	Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume usaha dan Aset -----x 100% Jumlah Seluruh Koperasi	3.343 -----x100% 4.295 = 77,83 %	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Data terlampir
		2	Presentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha -----x 100 % Jumlah usaha kecil keseluruhan	100 -----x100% 1.178 = 8,49 %	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Data terlampir



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Penanaman Modal

No	Urusan Pemerintahan	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	$\frac{(\text{Jumlah Investasi tahun } n - \text{Jumlah investasi tahun } n-1 \text{ di Provinsi})}{\text{Jumlah Investasi tahun } n-1 \text{ di Provinsi}} \times 100\%$	$\begin{aligned} &= \text{Rp.} 3.050.937.900.000 - \text{Rp.} 5.246.840.000.000 \\ &\text{-----} \times 100 \% \\ &\text{Rp. } 5.246.840.000.000 \\ &= \text{Rp. } -2.195.850.000.000 \\ &\text{-----} \times 100 \% \\ &\text{Rp. } 5.246.840.000.000 \\ &= -42 \% \end{aligned}$	DPMPTSP PROVINSI NTT	Capaian kinerja Penanaman Modal mengalami penurunan .. % bila dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2023 : Rp. 5.246.840.000.000,- terdiri dari (PMDN : Rp. 3.407.200.000.000,- dan PMA Rp. 1.839.640.000.000,- Realisasi Investasi Tahun 2024 : Rp. 3.050.937.900.000 terdiri dari (PMDN : Rp. 1.702.940.000.000 & PMA : Rp. 1.348.050.000.000 Capaian Kinerja terhadap Target RPJMD 53,53 % dan Capaian Kinerja terhadap Target Nasional 48,74 %



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Kepemudaan & Olahraga Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Kepemudaan & Olahraga

NO	URUSAN PEMERINTAH		IKK OUTCOME	Rumus	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepemudaan dan Olahraga	1.	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di provinsi -----x 100% Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di provinsi	4.980 -----x100% 1.599.000 = 0,31%	Dispora NTT	- Banyak Proposal dari kelompok usaha yang tidak memenuhi kriteria; - Alokasi anggaran untuk pemberdayaan dan pembinaan pemuda terbatas.
		2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada Organisasi kepemudaan dan Organisasi sosial kemasyarakatan di provinsi -----X 100% Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di Provinsi	0 -----x100% 1.599.000 = 0%	Dispora NTT	Indikator kinerja OKP di dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 tahun 2021 di drop sehingga tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan dimaksud
		3.	Peningkatan prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Total Medali yang di Peroleh : 101 Medali dengan rincian: Emas = 34 Perak = 31 Perunggu = 36	- Dispora NTT	1. Total medali yang diraih sampai dengan akhir realisasi adalah 69 medali, dengan rincian : - Emas : 25 - Perak : 19 Perunggu : 30 2. Total Medali Yang diraih dari cabang olahraga paralympic adalah 32 medali dengan rincian : - Emas : 9 - Perak : 12 - Perunggu : 11



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Kearsipan & Perpustakaan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Kearsipan & Perpustakaan

No.	Urusan Pemerintahan	No.	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kearsipan	1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 UU 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	$T = (a + l + s + j)/4$ T = Tingkat Ketersediaan Arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip l = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$T = (100\% + 100\% + 100\% + 23,75)/4$ = 80,94%	Hasil Olahan data yang dihimpun dari OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Data Depot Arsip Dinas Arspus Prov. NTT	
		2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan berbegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah	$T = (0,01\% + 600\% + 100 + 100\% + 100\% + 0)/6$ = 150%	Hasil Olahan data yang dihimpun dari OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan data Depo Arsip Dinas Arpus Prov. NTT	



No.	Urusan Pemerintahan	No.	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				kabupaten/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK			
2.	Perpustakaan	1.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survey/kajian kegemaran membaca masyarakat	70,34 poin	Hasil Kajian Perpustakaan Nasional RI	Link : https://satudata.perpusnas.go.id/index.php/2022/03/29/tingkat-kegemaran-membaca-tahun-2022/
		2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur unsure pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM). Indek Pembangunan Literasi Masyarakat = $\frac{\sum UPLM}{ALM} \times 100\%$	62,62%	Hasil Kajian Perpustakaan Nasional RI	Link : https://satudata.perpusnas.go.id/index.php/2022/03/31/indeks-pembangunan-literasi-perpusnas-tahun-2021/



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Kelautan & Perikanan NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Kelautan & Perikanan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kelautan & Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) provinsi -----x100% Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan	1.838.176 -----X100% 1.820.000 = 100,99 %	Dinas Kelautan Perikanan	
		2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	$X = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{ci}{s_i} \cdot 100\% \right)}{n}$ Ket : X = Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku ci = Jumlah sampel pelaku usaha KP yg diperiksa s_i = Jenis komponen pelaku usaha KP s_i = Jumlah sampel pelaku usaha KP yg diperiksa i i = Jenis komponen pelaku usaha KP n = Jumlah komponen pelaku usaha KP	$X = \frac{\sum_{i=1}^7 \left(\frac{13.328}{13.328} \cdot 100\% \right)}{7}$ = 100%	Satu Data KKP	Dimana : i = 1 n = 7 ci = 13.328 si = 13.328



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Pariwisata

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n} - \text{jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}} \times 100\%$	$\frac{358.646 - 319.573}{319.573} \times 100\%$ <p>= 12,22%</p>	Data Olahan Dinas Parekraf Provinsi NTT	Sebagian besar Kabupaten/Kota belum mengirimkan data kondisi final bulan desember 2024. Data dukung pada lampiran 1 IKK Outcome.
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n} - \text{jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}} \times 100\%$	$\frac{1.332.306 - 1.305.318}{1.305.318} \times 100\%$ <p>= 2,06 %</p>	Data Olahan Dinas Parekraf Provinsi NTT	Sebagian besar Kabupaten/Kota belum mengirimkan data kondisi final bulan desember 2024. Data dukung pada lampiran 2 IKK Outcome.
		3	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yg terjual}}{\text{Jumlah kamar yg tersedia}} \times 100\%$	$\frac{1.942.713}{4.214.490} \times 100\%$ <p>= 46,09%</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi NTT,	Kondisi capaian bulan November Tahun 2024.
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{\text{Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB}}{\text{Total PDRB Berlaku}} \times 100\%$	$\frac{2.676}{34.412} \times 100\%$ <p>= 7,77%</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi NTT.	Kondisi Capaian hingga TW III Tahun 2024. Kontribusi sektor pariwisata secara keseluruhan merupakan komposit dari lapangan usaha penyediaan akomodasi & makan minum, lapangan usaha transportasi dan pergudangan serta lapangan usaha jasa lainnya.



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas ESDM Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: ESDM

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ESDM	1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	$\frac{\text{Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda}}{\text{Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Prov}} \times 100\%$	$\frac{175}{175} \times 100\% = 100\%$	Dinas ESDM Provinsi NTT	
		2	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	$\frac{\text{Jumlah desa yang teraliri listrik}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	$\frac{3.322}{3.442} \times 100\% = 96,51\%$	Dinas ESDM Provinsi NTT	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Perindustrian & Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perindustrian	1	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	$\frac{\text{Jumlah industri besar tahun n} - \text{jumlah industri besar tahun n - 1}}{\text{Jumlah industri besar tahun n-1}} \times 100\%$	$\frac{2 - 2}{2} \times 100\%$ $\frac{0}{2} \times 100\%$ $= 0\%$	SIINAS 2023 dan 2024	
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dlm RPIP	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah (Target masing-masing indicator pada RPIP) $= 20\% \times \frac{\text{capaian}}{\text{target}}$	1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan persentase). $= 20\% \times \frac{6,36}{5,78}$ $= 22\%$	Dokumen RPIP - 2023-2043 Data Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha BPS Provinsi NTT Tahun 2024	
				Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)%	2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi $= 20\% \times \frac{14}{1,48}$ $= 18,92\%$	Data PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha, BPS Provinsi NTT 2024	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					3. Jumlah tenaga kerja sektor industri= = 20%x $\frac{(284,499)}{227,008}$ = 25,06%	Data BPS NTT 2024	
					4. Jumlah Eksport Sektor Industri Pengolahan Non Migas = = 20%x $\frac{(Rp.0.0012)}{Rp.0.0232}$ = 1,03%	e-SKA 2024	
					5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas = 20%x $\frac{(1.213)}{6.122}$ = 3,96% Capaiannya : 70,97%	Triwulan IV DPMPTSP	
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yg dipantau & dianalisis dalam laporan hasil pemantauan _____ x 100% Jumlah izin yg dikeluarkan	$\frac{14}{14} \times 100\%$ = 100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yg dipantau & dianalisis dalam laporan hasil pemantauan _____ x 100% Jumlah izin yg dikeluarkan	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yg dipantau \& dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{100\%} \times \text{Jumlah izin yg dikeluarkan}$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Ketersediaan Informasi Industri: <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%); - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%); - Tidak menyampaikan informasi industri (25%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%); - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%); - Informasi bahan bakar/ energy (10%); - Informasi tenaga kerja (10%); - Informasi investasi (10%). 	TOTAL = 125 %		
2	Perdagangan	1.	Pertumbuhan Nilai Ekspor non Migas	$\frac{\text{Nilai ekspor non migas tahun berjalan}}{\text{Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya}} \times 100\%$	$\frac{61.081.415 \text{ US\$} - 57.576.670 \text{ US\$}}{57.576.670 \text{ US\$}} \times 100\% = 6,087 \%$	Perkembangan Ekspor Import, Desember 2024 BRS No.10/02/53/Th.XXVI II,3 Februari 2025	
		2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	$\frac{\text{Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani \& diselesaikan Dinas Prov \& BPSK sesuai dengan ketentuan yg berlaku dalam tahun berjalan}}{\text{Jumlah Pengaduan Konsumen yang diterima dalam tahun berjalan}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0 \%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	
		3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	$\frac{\text{Jumlah sampel yg sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0 \%$	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		4	Tertib Usaha	$\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki SIUP MB TBB}}{\text{Jumlah pelaku usaha MB TBB}} \times 100\%$	$\frac{21}{21} \times 100\%$ $= 100\%$	Dinas Perindustrian & Perdagangan Prov NTT	
		5	Persentase Kinerja Realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$	$\frac{54.345}{190.340} \times 100\%$ $= 28,55\%$	Dinas Perindustrian & Perdagangan Prov. NTT	
		6.	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{\text{jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dg ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah barang beredar yang diawasi}} \times 100$	$= \frac{18}{18} \times 100\%$ $= 100 \%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov NTT	
		7.	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	$KVpt = \frac{Sn}{p} \times 100\%$ <p>KVpt = Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu Sn= Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember. P = rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember</p>	$\frac{4.101,18}{29.523,52} \times 100\%$ $= 13,89 \%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov NTT	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Trantibumlinmas

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TRANTIBUMLINMAS	1	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yg disusun}}{\text{Jumlah dokumen kebencanaan yg akan disusun}} \times 100\%$	$\frac{6}{13} \times 100\% = 100\%$	BPBD Provinsi NTT	KRB (Kajian Resiko Bencana) dan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) dan Rencana Kontinjensi Cuaca Ekstrim
		2	Persentase penanganan pra bencana	$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yg terfasilitasi dalam penanganan pra bencana}}{\text{Jumlah Kab/Kota di wilayah Prov}} \times 100\%$	$\frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$	BPBD Provinsi NTT	Kota Kupang, Kab Kupang, Manggarai Barat, Rote Ndao, Sabu Raijua, Flores Timur, Lembata, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, SBD, Manggarai, Manggarai Timur, TTS, TTU, Belu, Malaka, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, Alor Kerjasama dengan SIAP SIAGA
		3	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yg terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana}}{\text{Jumlah Kab/Kota di wilayah Prov yg mengalami bencana}} \times 100\%$	$\frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$	BPBD Provinsi NTT	22 Kab/Kota se Provinsi NTT



2.2.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

LAMPIRAN 2.2.3
1 (satu) Urusan

INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Badan Pendapatan & Aset Daerah Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Fungsi Penunjang

No	FUNGSI PENUNJANG	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Manajemen Keuangan	1	Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	1. Ya	BPAD	
				2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	2. Ya	BPAD	
				3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	3. Tidak	BPAD	Proses Inventarisasi belum bisa dilakukan karena sub bidang penatausahaan sementara memperbaiki data asset disesuaikan dengan Permendagri 47/2021, untuk persiapan mutase data pada aplikasi e-BMD
				4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	4. Tidak	BPAD	Tidak ada dalam Anggaran



INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Fungsi Penunjang

NO	FUNGSI PENUNJANG	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp. 501.509.271.941,59}}{\text{Rp. 4.721.442.776.992,22}} \times 100\%$ = 10,62 %	Badan Keuangan Daerah	
		2	Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB non migas}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp. 1.461.919.004.072,74}}{\text{Rp. 4.839.680.212.675,74}} \times 100\%$ = 30,21 %	Badan Keuangan Daerah	
		3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp. 4.215.861.673.470,40} - \text{1.176.610.311.408}}{\text{Rp. 4.721.442.776.992,22}} \times 100\%$ $\frac{\text{= Rp. 3.039.251.362.062}}{\text{Rp. 4.721.442.776.992,22}} \times 100\%$ = 64,37 %	Badan Keuangan Daerah	
		4	Opini Laporan Keuangan	(Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir)	Tahun 2014 = WDP Tahun 2015 s.d.Tahun 2023 = WTP	Badan Keuangan Daerah	



NO	FUNGSI PENUNJANG	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		5	Budget execution :Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\left(\left(\frac{\text{Nilai Absolut dari Total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}} \right) - 1 \right) \times 100\%$	$\frac{\text{Rp. 4.721.442.776.992,22} - 1}{\text{Rp. 5.290.514.318.980}} \times 100 \%$ <p>= -10,76%</p>	Badan Keuangan Daerah	
		6	Revenue mobilization : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\left(\left(\frac{\text{Nilai Absolut dari Total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD}} \right) - 1 \right) \times 100\%$	$\frac{\text{Rp. 1.461.919.004.072,74} - 1}{\text{Rp. 1.773.480.357.656}} \times 100\%$ <p>= - 17,57 %</p>	Badan Keuangan Daerah	
		7	Cash Management :Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	$\frac{\text{Nilai Realisasi SILPA}}{\text{Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp. 281.157.766.642,46}}{\text{Rp. 4.460.910.047.257,77}} \times 100\%$ <p>= 2,72%</p>	Badan Keuangan Daerah	



INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Inspektorat Daerah Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: FungsiPenunjang

No	Fungsi Penunjang	No	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perencanaan & Keuangan	1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0) /level 1 /level 2 /level 3 berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2 (2,859)	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Sesuai Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri (PM) dan Penjamin Kualitas (PK) Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintahan Provinsi NTT Tahun 2024 Nomor: PE.09.03/LHP-355/W24/3/2024, tanggal September 2024
		2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0) /level 1/ level 2/ level 3 berdasarkan Laporan Hasil quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3 (3,090)	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Sesuai Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024 Nomor: PE.09.03/LHP-311/PW24/6/2024, tanggal 21 Agustus 2024



INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Biro Pengadaan Barang/Jasa setda Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: FungsiPenunjang

No	FUNGSI PENUNJANG	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengadaan	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dgn nilai besar yg perlu pembangunan dalam 3 kuartal yg ditandatangani pada kuartal pertama tahun n}}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun n}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Biro PBJ Setda Prov.NTT TA 2024	
		2	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yg dilakukan dgn metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan seluruhnya}} \times 100\%$	$\frac{2.561}{3.568} \times 100\% = 77,71 \%$	Biro PBJ Setda Prov.NTT TA 2024	
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja operasi dan modal yg melalui pengadaan}}{\text{Total belanja operasi dan modal}} \times 100\%$	$\frac{2.844.127.000.000}{4.322.313.687.267} \times 100\% = 65,80\%$	Biro PBJ Setda Prov.NTT TA 2024	1.
		4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produk dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2024 - Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produk dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2023}}{\text{Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produk dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2023}} \times 100\%$	$\frac{1.448.019.173.733 - 811.456.603.179}{811.456.603.179} \times 100\% = 78,48\%$	Biro PBJ Setda Prov.NTT TA 2024	



INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: FungsiPenunjang

No	Fungsi Penunjang	No	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepegawaian	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	Jumlah pegawai menurut Pendidikan Tinggi ke atas (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) -----x100% Seluruh jumlah pegawai (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	4.793 -----x100% 6.374 = 75,20%	Simpeg BKD Prov.NTT	
		2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	Jumlah pegawai PNS Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) -----X 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	899 ----x100% 6.374 = 14,10%	Simpeg BKD Prov.NTT	
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (diluar guru dan tenaga kesehatan) -----X 100% Seluruh Jumlah Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	535 -----x100% 899 = 59,51%	Simpeg BKD Prov.NTT	



INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Komunikasi & Informatika Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Fungsi Penunjang

No	Fungsipenunjang	No	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Transparansi & Partisipasi Publik	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayan (information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi belanja untuk unit palayanan dapat di akses di website pemda -----X100% Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat di akses di website pemda	1 ----X100% 1 = 100%	Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	
		2	Akses public terhadap informasi keuangan daerah (Publik access to fiscal information)	Jumlah dokumen yg dipublikasi di website Pemda -----X100% Total jumlah dokumen yg telah di rinci	17 ----X100% 17 = 100%	Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	



2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, terdapat 16 (enam belas) Sasaran Strategis yang diperjanjikan sebagai penjabaran dari 4 (empat) Tujuan, 29 (dua puluh sembilan) Indikator dan 75 (tujuh puluh lima) Program. Gambaran akuntabilitas kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan 1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN SOSIAL

Tujuan Misi ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (stakeholder) dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk pada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek kelembagaan.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Beserta Pengolahan Produk Untuk Meningkatkan Nilai Tambah

Sasaran strategis ini mencakup satu (1) indikator sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	realisasi 2023	2024			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Pertumbuhan PDRB	%	3,52	3,1	3,73	120,33	4,75-5,65	78,53-66,02
Rata-rata Capaian						120,33		

Sumber data: BPS NTT 2023, diolah

A. Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

a. Capaian Target Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi (PDRB) adalah sebesar 3,73% atau dengan capaian sebesar 120,32% dari target yang ditetapkan sebesar 3,1%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2024, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) meningkat sebesar 5,97%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka, capaian terhadap target pesimis sebesar 78,53% dan capaian terhadap target optimis sebesar 66,02%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

PDRB ADHB Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun tahun 2024 sebesar Rp. 137,28 triliun. Sumbangan terbesar untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku



(ADHB) NTT tahun 2024 adalah dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 28,87%. Faktor lain yang mempengaruhi PDRB adalah dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,80% dan lapangan usaha Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,74%. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 66,50%.

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian indikator pertumbuhan PDRB untuk sasaran strategis **"Tumbuhnya ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan"** adalah sebesar 120,33% dengan kategori **Berhasil**, bahkan melampau target tahun 2024.

Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Peranan Pariwisata Untuk Mendukung Perekonomian

Sasaran ini mencakup 2 (dua) indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel								
Target dan Capaian Indikator Kinerja								
No	Indikator Kinerja	Satuan	realisasi 2023	2024			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Kontribusi Pariwisata pada PDRB	%	0,65	7,59	5,83%	76,81	7,79	74,84
2.	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Juta)	Juta	-	80.758,35	77.760	96,29	89.715,74	86,67
Rata-rata Capaian						86,88		

Sumber: BPS NTT 2023, diolah

A. Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Pariwisata pada PDRB

a. Capaian target Kontribusi Pariwisata pada PDRB

Pada tahun 2024 Kontribusi Pariwisata pada PDRB adalah sebesar 5,83% atau dengan capaian sebesar 76,81% dari target yang ditetapkan sebesar 7,59%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka, capaian terhadap target ahkhir RPJMD adalah sebesar 74,84%. Sementara, Pada tahun 2023, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tercatat sebesar 0,65%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB masih belum memenuhi target yang ditetapkan.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Beberapa faktor yang memengaruhi kinerja sektor ini antara lain:

- Infrastruktur dan Aksesibilitas Wisata
 - Terbatasnya akses transportasi ke destinasi wisata unggulan,

terutama di daerah terpencil di NTT, menyebabkan rendahnya arus kunjungan wisatawan.

- Kualitas infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan, dan bandara memengaruhi kenyamanan dan minat wisatawan untuk berkunjung.
- Promosi dan Pemasaran Pariwisata
 - Strategi promosi yang belum optimal di tingkat nasional dan internasional menyebabkan rendahnya eksposur destinasi wisata NTT.
 - Keterbatasan anggaran promosi pariwisata memengaruhi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
- Dampak Pandemi dan Perubahan Perilaku Wisatawan
 - Pemulihan sektor pariwisata dari dampak pandemi COVID-19 masih berlangsung, memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan.
 - Perubahan preferensi wisatawan ke arah wisata berbasis komunitas dan alam memerlukan adaptasi dari pelaku usaha pariwisata.
- Keterlibatan Masyarakat dan SDM Pariwisata
 - Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata masih terbatas.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata memengaruhi kualitas layanan dan pengalaman wisatawan.

2. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Juta)

a. Capaian Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Juta)

Pada tahun 2024 Nilai Tambah Ekonomi Kreatif adalah sebesar 77.760% atau dengan capaian sebesar 96,29% dari target yang ditetapkan sebesar 80.758,35%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka, capaian terhadap target akhir RPJMD adalah sebesar 86,67%. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif hampir mencapai target yang telah ditentukan, mencerminkan pertumbuhan yang cukup baik di sektor ini.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Beberapa faktor yang memengaruhi kinerja sektor ini antara lain:

- Ketersediaan Teknologi dan Inovasi

Pemanfaatan teknologi modern menjadi faktor utama dalam meningkatkan produktivitas dan menciptakan nilai tambah bagi produk kreatif. Adopsi teknologi digital dalam pemasaran melalui *platform e-commerce* memungkinkan produk ekonomi kreatif NTT menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar nasional dan internasional. Selanjutnya pengembangan produk berbasis budaya

dan kearifan lokal, seperti tenun ikat Sabu Raijua atau kerajinan tradisional lainnya, menjadi daya tarik unik yang mendorong peningkatan permintaan.

- **Kolaborasi dan Kemitraan**
Kemitraan yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas kreatif memainkan peran penting dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di NTT. Kolaborasi dengan industri dan lembaga swasta yang telah dilakukan memungkinkan pelaku ekonomi kreatif mengakses pasar yang lebih luas serta memperluas distribusi produk mereka.
- **Akses Pasar dan Promosi**
Kinerja ekonomi kreatif yang telah capai sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha yang sudah semakin baik dalam mengakses pasar dan melakukan promosi yang efektif. Hal ini ditunjang dengan peran pariwisata sebagai pasar ekonomi kreatif.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kedua indikator terhadap target tahun 2024 adalah sebesar 86,88%. Capaian ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat tantangan dalam memenuhi target kontribusi pariwisata, sektor ekonomi kreatif memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT.

Sasaran Strategis 3 : Sasaran Strategis 3 :

Sasaran ini mencakup 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel Target dan Capaian Indikator Kinerja								
No	Indikator Kinerja	Satuan	realisasi 2023	2024			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Realisasi nilai investasi	Triliun		5,3	4,217	79,55	17,2	24,52
2.	Neraca perdagangan	Triliun		-26,7	-51	52,35	-23,05	45,18
Rata-rata Capaian						65,95		34,85

Sumber data: BPS NTT 2023 dan Bappelitbangda Provinsi NTT, diolah

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. **Realisasi nilai investasi**

a. **Capaian target Realisasi nilai investasi**

Pada tahun 2024, realisasi nilai investasi di NTT mencapai Rp 4,217 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp 5,3 triliun, atau sebesar



79,55% dari target tahunan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 sebesar Rp 17,2 triliun, maka capaian terhadap target akhir ini baru mencapai 24,52%. Capaian yang masih jauh dari target akhir menunjukkan perlunya upaya intensif untuk menarik investasi lebih besar.

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Beberapa faktor penyebab capaian kinerja realisasi investasi di NTT tahun 2024, antara lain:

- Masih terbatasnya infrastruktur dan tingginya biaya logistik
Keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan, listrik, dan telekomunikasi di beberapa wilayah menyebabkan investor kurang tertarik untuk menanamkan modal di NTT. Keterbatasan infrastruktur dengan kondisi geografis NTT turut mengakibatkan tingginya biaya logistic. Hal ini turut menjadi faktor penghambat investasi di daerah.
- Iklim Investasi yang Belum Optimal
Meskipun pemerintah daerah berupaya mendorong investasi, birokrasi dan perizinan yang belum sepenuhnya efektif terimplementasi di lapangan menyebabkan proses investasi berjalan lambat.
- Daya Tarik Sektor Unggulan
Sektor potensial seperti pariwisata, pertanian, dan energi baru terbarukan belum sepenuhnya dikembangkan secara optimal, sehingga tidak mampu menarik investasi besar secara signifikan.
- Produktivitas dan Kualitas Produk Lokal
Rendahnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan, serta kualitas produk yang belum memenuhi standar internasional, menjadi penghambat utama dalam meningkatkan ekspor.

2. **Neraca perdagangan**

a. **Capaian Target Neraca perdagangan**

Neraca perdagangan NTT pada tahun 2024 menunjukkan defisit sebesar Rp -51 triliun, lebih besar dari target defisit yang ditetapkan sebesar Rp -26,7 triliun. Dengan demikian, tingkat pencapaian terhadap target 2024 hanya sebesar 52,35%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 yang mengharapkan defisit berkurang menjadi Rp -23,05 triliun, capaian baru mencapai 45,18%. Defisit yang masih tinggi ini menunjukkan tantangan besar dalam meningkatkan ekspor daerah, mengurangi ketergantungan impor, serta mendorong diversifikasi produk unggulan lokal.

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Beberapa faktor penyebab capaian kinerja Neraca Perdagangan di NTT tahun 2024, antara lain:

- **Ketergantungan pada Barang Impor**
NTT masih sangat bergantung pada pasokan barang kebutuhan pokok, bahan baku industri, dan barang konsumsi dari luar daerah. Hal ini menyebabkan aliran keluar devisa lebih besar dibandingkan pendapatan dari ekspor.
- **Keterbatasan Diversifikasi Produk Ekspor**
Ekspor NTT masih didominasi oleh komoditas primer seperti hasil pertanian (jagung, kopi) dan peternakan (sapi). Kurangnya diversifikasi produk dengan nilai tambah tinggi membatasi pendapatan ekspor.
- **Akses Pasar yang Terbatas**
Kendala geografis dan logistik menyebabkan biaya transportasi tinggi, sehingga produk lokal sulit bersaing di pasar nasional maupun internasional.
- **Produktivitas dan Kualitas Produk Lokal**
Rendahnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan, serta kualitas produk yang belum memenuhi standar internasional, menjadi penghambat utama dalam meningkatkan ekspor.
- **Perubahan Iklim dan Bencana Alam**
Cuaca ekstrem dan bencana alam di beberapa wilayah NTT menyebabkan terganggunya produksi sektor pertanian dan perikanan, yang berdampak pada penurunan volume ekspor.

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis ” **Meningkatnya Investasi Dan Neraca Perdagangan**” sebesar 65,95% dengan kategori **Belum Berhasil**.

Sasaran Strategis 4 : Terciptanya Lapangan Kerja Dan Meningkatnya Kesempatan Kerja

Sasaran strategis terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya kesempatan kerja mencakup tiga indikator sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel Target dan Capaian Indikator Kinerja							
Indikator Kinerja	Satuan	realisasi 2023	2024			RPD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
Tingkat pengangguran terbuka	%	3,14 Agustus 2023	2,66 – 3,37	3.02 (Agustus 2024)	86.47-110.39	2,25-2,05	65.78-52.68
Capaian					87,79-89,91		

Sumber data: BPS Provinsi NTT, November 2024

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. **Tingkat pengangguran terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

a. **Capaian Target Tingkat Pengangguran Terbuka**

Realisasi tingkat pengangguran terbuka pada bulan Agustus tahun 2024 adalah sebesar 3,02% atau dengan capaian sebesar 110,39% dari target pesimis yang ditetapkan sebesar 3,37%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target optimis sebesar 2,66%, maka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 mencapai 86,47%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada bulan Agustus tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 0,12%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2024 maka capaian terhadap target pesimis sebesar 65,78% dan capaian terhadap target optimis sebesar 52,68%.
Realisasi TPT nasional pada bulan agustus 2024 adalah sebesar 4,91%. Jika dibandingkan dengan realisasi TTP nasional, TPT Provinsi NTT tahun 2024 lebih rendah 1,89%.

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Penurunan TPT ini menunjukkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan di NTT. Beberapa faktor yang mendukung perbaikan ini adalah:

- Peningkatan jumlah angkatan kerja
- Peningkatan jumlah pekerja
- Peningkatan jumlah pekerja formal
- Peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis ” **Terciptanya Lapangan Kerja Dan Meningkatnya Kesempatan Kerja**” sebesar 87,79-89,91% dengan kategori **Sangat Berhasil**.



Sasaran Strategis 5: Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Sasaran strategis meningkatkan daya beli masyarakat mencakup dua indikator sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel Target dan Capaian Indikator Kinerja								
No	Indikator Kinerja	Satuan	realisasi 2023	2024			RPD	
				Target	Realisasi (ribu rupiah)	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Pengeluaran per kapita	Rupiah	8,248	7,598	8,534	112,32	7,954	107,29
2	Inflasi	%	2,42	3,5±1	1,19	166-81	35,1±1	166-81
Rata-rata Capaian						119,71		118.10

Sumber data: BPS Provinsi NTT, Desember 2024

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. **Pengeluaran per kapita**

Pengeluaran per kapita adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Dengan kata lain, pengeluaran per kapita merupakan instrumen yang digunakan untuk memotret kemampuan rata-rata individu-individu dalam setiap rumah dalam aspek konsumsi.

a. **Pengeluaran per kapita**

Realisasi pengeluaran per kapita pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8,534 juta per tahun, artinya setiap satu orang di Provinsi NTT setiap tahunnya mampu untuk melakukan pembelian sebesar Rp. 8,534 juta setiap tahunnya atau jika dirubah menjadi per bulan maka tiap orang di Provinsi NTT memiliki kemampuan untuk berbelanja sebesar kurang lebih Rp. 711 ribu, dengan pengeluaran terendah adalah di Kabupaten Sabu Raijua yakni sebesar Rp. 6,207 juta tiap tahunnya. Sedangkan pengeluaran tertinggi adalah sebesar Rp. 14,001 juta yakni di Kota Kupang. Capaian pengeluaran per kapita pada tahun 2024 adalah sebesar 112.32% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 7.598 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar Rp. 286 ribu. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2024 sebesar Rp. 7,954 juta, maka pengeluaran per kapita telah mencapai 107,29%.

Realisasi Pengeluaran per kapita nasional pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 12,34 juta per tahun. Jika dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran per kapita nasional, Pengeluaran per kapita Provinsi NTT tahun 2024 masih lebih rendah sebesar Rp. 3,81 juta.



- b. **Faktor-Faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**
- Peningkatan pengeluaran per kapita di Nusa Tenggara Timur (NTT) dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kepadatan penduduk, Pengeluaran pemerintah.

Tabel
Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota

Wilayah	Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah)		
	2022	2023	2024
Sumba Barat	7,627	7,993	8,243
Sumba Timur	9,641	10,008	10,280
Kupang	7,776	8,220	8,508
Timor Tengah Selatan	7,118	7,450	7,755
Timor Tengah Utara	6,559	6,889	7,242
Belu	7,593	7,907	8,159
Alor	7,198	7,565	7,806
Lembata	7,622	7,962	8,238
Flores Timur	7,918	8,223	8,505
Sikka	8,362	8,678	9,019
Ende	9,413	9,739	10,009
Ngada	8,997	9,350	9,585
Manggarai	7,580	7,903	8,204
Rote Ndao	6,719	7,061	7,365
Manggarai Barat	7,636	7,913	8,195
Sumba Tengah	6,288	6,484	6,743
Sumba Barat Daya	6,779	7,080	7,358
Nagekeo	8,433	8,706	8,986
Manggarai Timur	6,145	6,276	6,561
Sabu Raijua	5,558	5,899	6,207
Malaka	6,250	6,569	6,879
Kota Kupang	13,513	13,762	14,001
Nusa Tenggara Timur	7,877	8,248	8,534

Sumber data: BPS Provinsi NTT, November 2024

2. **Inflasi**

Pengeluaran per kapita adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Dengan kata lain, pengeluaran per kapita merupakan instrumen yang digunakan untuk memotret kemampuan rata-rata individu-individu dalam setiap rumah dalam aspek konsumsi.



a. **Capaian target inflasi**

Realisasi pengeluaran per kapita pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8,534 juta per tahun, artinya setiap satu orang di Provinsi NTT setiap tahunnya mampu untuk melakukan pembelian sebesar Rp. 8,534 juta setiap tahunnya atau jika dirubah menjadi per bulan maka tiap orang di Provinsi NTT memiliki kemampuan untuk berbelanja sebesar kurang lebih Rp. 711 ribu, dengan pengeluaran terendah adalah di Kabupaten Sabu Raijua yakni sebesar Rp. 6,207 juta tiap tahunnya. Sedangkan pengeluaran tertinggi adalah sebesar Rp. 14,001 juta yakni di Kota Kupang. Capaian pengeluaran per kapita pada tahun 2024 adalah sebesar 112.32% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 7.598 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar Rp. 286 ribu. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2024 sebesar Rp. 7,954 juta, maka pengeluaran per kapita telah mencapai 107,29%.

Realisasi Pengeluaran per kapita nasional pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 12,34 juta per tahun. Jika dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran per kapita nasional, Pengeluaran per kapita Provinsi NTT tahun 2024 masih lebih rendah sebesar Rp. 3,81 juta.

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Inflasi y-on-y Desember 2024 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 9 dari 11 indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,90 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,54 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,38 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,36 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,07 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,52 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,59 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok transportasi sebesar 0,13 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,51 persen pada Desember 2024.

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis ” **Meningkatkan Daya Beli Masyarakat**” sebesar 119,71% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Sasaran Strategis 6 : Menurunnya Kemiskinan Masyarakat

Sasaran ini mencakup satu indikator kinerja sebagai berikut:



Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	2024			RPD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	%	19.96	20-19,63	19,02	104,90-103.11	18,50-17,03	97.19- 88.31
Capaian					104.00		92.75

Sumber data: BPS Provinsi NTT, Desember 2024

A Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1 **Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan**

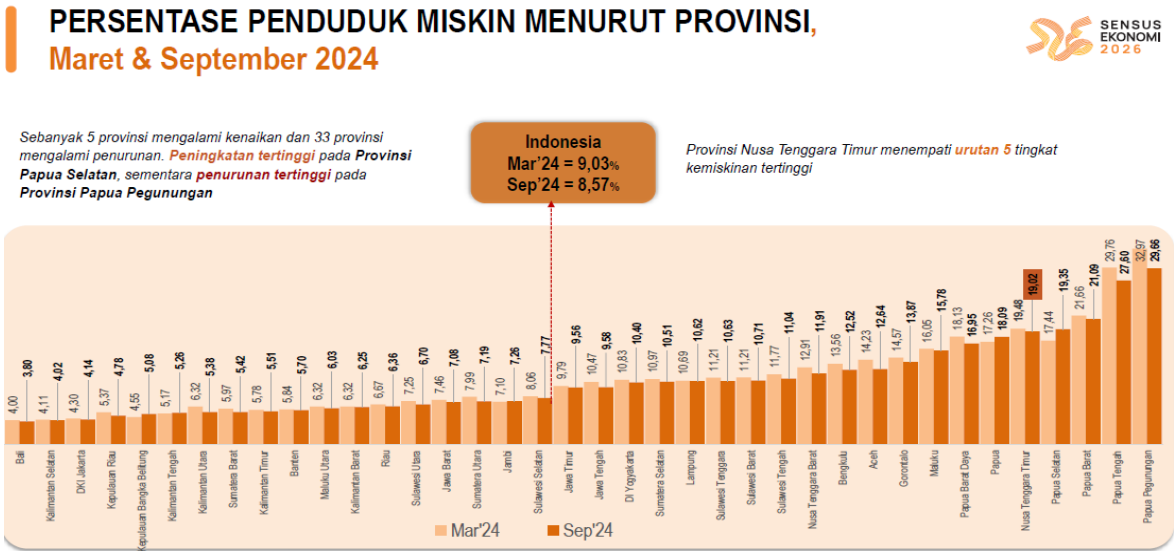
Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan adalah persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori perkapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Semakin sedikit persentase penduduk yang masuk dalam golongan penduduk miskin berarti semakin banyak penduduk yang pengeluaran perkapita perbulannya berada di atas garis kemiskinan dibandingkan dengan kelompok yang pengeluaran perkapita perbulannya berada di bawah garis kemiskinan, dan sebaliknya.

a **Capaian target Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan**

Jumlah penduduk miskin di NTT adalah 1,11 juta jiwa. Realisasi Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan pada tahun pada September 2024 adalah sebesar 19,02%. Angka ini menurun 0,46% dibandingkan Maret 2024. Jika dibandingkan dengan target pesimis tahun 2024 sebesar 20%, capaian Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan adalah sebesar 104.90%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target optimis tahun 2024 sebesar 19,63%, maka capaian Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan adalah sebesar 103,11%. Jika dibandingkan dengan target pesimis pada akhir RPD sebesar 18,5%, capaian Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan adalah sebesar 97,19%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target optimis pada tahun akhir RPD sebesar 17.03%, capaian Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan adalah sebesar 88,31%.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,06 juta orang, dengan persentase 8,57%. NTT merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Tingkat kemiskinan di provinsi NTT lebih tinggi dari rata-rata tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,45%.

Gambar...
Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi



Sumber : BPS Provinsi NTT, September 2024

b **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Daerah miskin pada umumnya selain memiliki akses pada sumber daya ekonomi rendah, juga merupakan daerah dengan tingkat pendidikan rendah, akses terhadap air bersih sulit, dan akses terhadap fasilitas kesehatan rendah. Masalah-masalah kesehatan seperti gizi buruk pada anak-anak juga lebih banyak terdapat di daerah miskin. Kenaikan harga barang mengakibatkan banyak sektor mengalami kontraksi. Kontraksi yang terjadi berkorelasi lurus dengan pendapatan dan kesejahteraan. Pendapatan yang relatif menurun, hasil produksi relatif tetap, jumlah penduduk bertambah dan turunnya daya beli masyarakat meskipun pengaruhnya kecil namun tetap berkontribusi terhadap jumlah penduduk miskin. Penanggulangan dan penanganan kemiskinan harus dilakukan secara kolaboratif dan komprehensif, oleh semua stakeholders, pada setiap level pemerintahan.

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis **"Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat"** sebesar 104.00% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Sasaran Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Antara Kelompok

Strategis 7 : Masyarakat

Sasaran ini mencakup satu indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	2024			RPD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
Indeks Gini	%	0,325	0,336-0,338	0,316	94,04-93,49	0,332-0,330	105,06 – 104,43
Capaian					93.49		

Sumber data: BPS Provinsi NTT, Desember 2024



A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. **Indeks Gini**

a. **Capaian target pencapaian Indeks Gini**

Indeks Gini menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dalam Masyarakat di NTT. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi NTT yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 0,316. Angka ini menurun 0,009 poin dengan capaian sebesar 94,04% jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,325 dan menurun 0,024 poin sebesar 104,41% . Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada pada Tahun 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat rendah.

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Indeks gini mengalami perubahan signifikan sejalan dengan penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi NTT dimana pada Tahun 2023 sebesar 19,96% sedangkan pada Tahun 2024 persentase penduduk miskin sebesar 19,48% sehingga mengalami penurunan 0,48%. Permasalahan indeks gini rasio di Provinsi NTT dipengaruhi oleh kondisi disparitas antar wilayah. Disparitas antara perkotaan dan pedesaan yang masih tinggi, sehingga meskipun tingkat kemiskinan menurun, namun disparitas kemiskinan perkotaan dan pedesaan di Provinsi NTT masih tinggi. Tahun 2024, persentase penduduk miskin di pedesaan sebesar 23,02%, sedangkan di perkotaan sebesar 8,11%.

Sesuai penjelasan diatas, rata-rata capaian sasaran strategis “Berkurangnya ketimpangan antar kelompok Masyarakat dan antar wilayah “sebesar 94,04% dengan kategori Sangat Berhasil, sehingga solusi untuk mengatasi disparitas wilayah yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dalam masyarakat yakni:

1. Menyusun strategi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur;
2. Pengembangan pelayanan kesehatan dan Pendidikan;
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
4. Pemerataan pembangunan infrastruktur
5. Meningkatkan pendapatan asli daerah

Meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat dengan melakukan pemusatan ekonomi di wilayah-wilayah yang mengalami ketimpangan

Sesuai penjelasan diatas, rata-rata capaian sasaran strategis “Berkurangnya ketimpangan antar kelompok Masyarakat dan antar wilayah “ sebesar 94,04% dengan kategori **Sangat Berhasil**.



Sasaran Strategis 8 : **Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah**

Sasaran ini mencakup satu indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel							
Capaian Indikator Kinerja							
Indikator Kinerja	Satuan	realisasi 2023	2024			RPD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
Ratio PAD terhadap pendapatan daerah	%	30,65	31,74	30,21	95,17	26,85	84,59
Rata-rata Capaian					95,17		84,59

Sumber data: LKIP Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Tahun 2024, Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024 (data belum selesai audit)

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. **Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan**

a. **Capaian Target Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan**

Target persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar 31,74% atau Rp.1.581.781.608.941 dengan realisasi sebesar 30,21% atau Rp.1.461.919.004.072,74 dengan capaian 95,18%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, maka pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,44% atau Rp.119.862.604.868,26,-. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 maka capaiannya sebesar 84,59%.

Target dan Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI (Rp)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,581,781,608,941.00	1,461,919,004,072.74
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	1,242,171,027,017.00	1,224,965,044,135,55
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	60,567,956,055.00	26,087,422,087.23
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	37,064,277,605.00	31,749,907,192.00
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	241,978,348,264.00	179,116,630,657,96
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3,412,809,821,000.00	3,375,772,289,432.00
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3,412,809,821,000.00	3,375,772,289,432.00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2,548,344,000.00	1,988,919,167.00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	2,548,344,000.00	1,988,919,167.00

Sumber data: LKIP Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Tahun 2024, Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024 (data belum selesai audit)

b. **Faktor- faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Persentase PAD terhadap total pendapatan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,44% sehingga jika dilihat pada Tabel di atas namun jika dilihat dari tabel di atas, jumlah PAD pada tahun 2024



belum mencapai target yang ditetapkan atau hanya mencapai 95,18% dari target yang ditetapkan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada pembayaran pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- 2) Kebijakan refocusing anggaran berdampak pada belanja modal perangkat daerah yang mendukung obyek retribusi tidak terealisasi;
- 3) Rencana kerja sama dengan pihak ke-3 yang telah dijadikan sebagai obyek penerimaan tidak terealisasi;
- 4) Belum tersedianya Produk Hukum bagi obyek retribusi baru.

Sesuai penjelasan diatas, rata-rata capaian sasaran strategis “Berkurangnya ketimpangan antar kelompok Masyarakat dan antar wilayah “sebesar 94,04% dengan kategori Sangat Berhasil. Dalam rangka mendukung pencapaian peningkatan target Pendapatan Asli Daerah diperlukan solusi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak;
- 2. Melakukan pengembangan potensi retribusi;
- 3. Melakukan Tax Amnesty;
- 4. Optimalisasi penerimaan sumber-sumber objek pajak baru;
- 5. Pengembangan potensi paariwisata.

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah**” sebesar 95,17% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Sasaran Strategis 9 : Terjaminnya Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak, Disabilitas Dan Inklusi Sosial
Sasaran ini mencakup empat indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	realisasi 2023	2024			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Indeks pembangunan gender	%	92,96	94	93,38	99,34	94,56	100,59
Rata-rata Capaian						99,34		

Sumber data: LKIP DP3A Prov.NTT Tahun 2023



A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Gender

a. Capaian Target Indeks Pembangunan Gender

Realisasi Indeks Pembangunan Gender tahun 2024 sebesar 93,38% dari target yang ditetapkan sebesar 94% atau tercapai 99,34%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 0,42 poin. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026, Indeks Pembangunan Gender telah mencapai 100,59%.

b. Faktor- faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencaapaian indikator indeks pembangunan gender antara lain:

1. Angka Harapan Hidup yang semakin membaik;
2. Peningkatan cakupan pendampingan gender dan
3. Adanya Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
4. Adanya data terpilah gender dan anak;
5. Adanya layanan penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan kekerasan

Untuk menunjang pencapaian indeks Pembangunan gender maka anggaran sebesar Rp.202.631.079.282 dari total anggaran Rp.4.322.313.687.267 atau 4,68%.

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata capaian misi “**Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan**” sebesar 92,75 % dengan Kategori **Sangat Berhasil**.

Sasaran Strategis 10 : Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan

Sasaran ini mencakup empat indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	realisasi 2023	2024			RPD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
Skor Pola Pangan Harapan	Poin	75.3	85.20	72.38	84.95	95,10	76.10
Rata-rata Capaian					84.95		

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan

a. Capaian Target Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan

Skor pola pangan harapan menggambarkan tingkat keberagaman konsumsi masyarakat. Adapun angka ideal bagi skor PPH adalah 100 poin. Angka ideal tersebut dicapai pola konsumsi penduduk NTT telah mencapai pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Kondisi konsumsi pangan NTT ditinjau dari sisi kuantitas yaitu hasil analisa PPH tahun 2024 berdasarkan angka SUSENAS

dari BPS NTT, konsumsi energy NTT rata-rata 1.930,43 kkal/kap/hari atau 91,92% terhadap angka kecukupan energy 2.100 kkal/kap/hari dan konsumsi protein 55,06 gr/kap/hari atau 96,59% terhadap angka kecukupan protein 57 gr/kap/hari.

- b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**
- Skor PPH provinsi NTT tahun 2024 sebesar 72.38 dari target akhir renstra sebesar 95,1 poin, jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 75,30 poin terjadi penurunan sebesar 2,92 poin. Hal ini disebabkan pola pangan di masyarakat yang belum menerapkan B2SA serta daya beli masyarakat yang masih rendah
- Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis “terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan” sebesar 95,24% atau dengan kategori **sangat berhasil**.

- B. **Analisis dukungan Program dan Anggaran dalam pencapaian Misi**
- Keberhasilan Tujuan satu : **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN SOSIAL”** didukung oleh 13 (tiga belas program dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18,567,535,832,- dengan realisasi sebesar Rp. 16,061,544,129,- atau 86,50%

Tabel
Rincian Program, Anggaran dan Realisasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN APBD (Rp)	REALISASI
MISI I			
1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	196,150,000	-
2	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	10,019,549,850	8,837,344,473
3	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3,789,529,032	3,503,527,799
4	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	221,000,000	117,182,100
5	Penyuluhan Pertanian	648,657,150	472,963,900
6	Penanganan Kerawanan Pangan	96,050,000	-
7	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	200,000,000	-
8	Pemasaran Pariwisata	195,000,000	159,924,275
9	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	375,000,000	354,922,527
10	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,500,000,000	1,419,797,901
11	Perlindungan Perempuan	1,008,502,800	923,540,664
12	Perlindungan Khusus Anak	318,097,000	272,340,490
TOTAL ANGGARAN		18,567,535,832	16,061,544,129

Sumber: LKIP Perangkat daerah Provinsi NTT tahun 2022



TUJUAN II : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING

Tujuan ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang. Tujuan II diukur dengan capaian pada 2 (dua) sasaran yaitu Meningkatnya akses dan kualitas SDM NTT yang berdaya saing dan Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Kesehatan yang diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas SDM NTT yang
Strategis 1 : Berdaya Saing

Sasaran ini mencakup 3 (tiga) indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel Target dan Capaian Indikator Kinerja								
No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	2024			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Indeks Pembangunan Manusia	%	68,40	66,58-66,73	69,14	103,84-103,61	67,02-67,25	103,16-102,81
2.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,82	7,75	8,02	103,48	8,2	97,80
3.	Harapan Lama sekolah	Tahun	13,22	14,2	13,23	93,17	15	88,20
	Rata-rata Capaian Sasaran					100,16		

Sumber : BPS NTT 2024 diolah

A. Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

a. **Capaian Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan di semua dimensi pembentuknya, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Namun, pertumbuhan IPM 2024 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, IPM Indonesia mencapai 75,02, meningkat 0,63 poin atau 0,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,39. Dalam Human Development Report 2023/2024 yang dirilis United Nations Development Programme (UNDP), IPM Indonesia berada di angka 112 dunia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 mencapai 69,14, meningkat 0,74 poin (1,08 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (68,40) Peningkatan IPM 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD maka capaiannya sebesar 103,16-102,81.



Tabel
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Tahun 2023-2024

Wilayah	Tahun	
	2023	2024
Sumba Barat	66,82	67,70
Sumba Timur	69,63	70,28
Kupang	67,51	68,26
Timor Tengah Selatan	65,39	66,22
Timor Tengah Utara	66,56	67,27
Belu	67,50	68,13
Alor	66,82	67,70
Lembata	68,41	68,95
Flores Timur	69,24	69,79
Sikka	69,41	69,96
Ende	71,77	72,24
Ngada	71,61	72,04
Manggarai	68,48	69,35
Rote Ndao	65,79	66,40
Manggarai Barat	67,84	68,68
Sumba Tengah	63,63	64,46
Sumba Barat Daya	63,74	64,27
Nagekeo	69,03	69,70
Manggarai Timur	65,05	66,03
Sabu Raijua	61,37	62,06
Malaka	64,50	65,13
Kota Kupang	82,77	83,21
Nusa Tenggara Timur	68,40	69,14

Sumber data:
BPS NTT
2024

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran untuk mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM dihitung dengan menggunakan rata-rata geometrik dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Peningkatan IPM paling signifikan terjadi pada dimensi pengetahuan. “Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun meningkat dari 13,22 menjadi 13,23 tahun, sementara rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas naik dari 7,82 tahun menjadi 8,02 tahun. Ini menunjukkan perbaikan akses pendidikan,”.

ada dimensi umur panjang dan hidup sehat, harapan hidup bayi yang lahir tahun 2024 mencapai 71,83 tahun, naik 0,26 tahun dibandingkan 2023. Sedangkan pada dimensi standar hidup layak, rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun meningkat 3,47 persen, yaitu sebesar 286 ribu rupiah.

2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

a. Capaian Target Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau Mean years of schooling (MYS) adalah jumlah tahun yang sudah ditempuh oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dihitung untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas. RLS penduduk berumur 15 tahun ke atas di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 sebesar 8,02 tahun, atau mengalami kenaikan 0,20 dari tahun 2023 yang mencapai 7,82 tahun. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 7,75 tahun maka terdapat gap sebesar 0.07 tahun. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD yaitu 8,2 tahun maka capaiannya sebesar 97,80%.

Capaian ini merupakan kontribusi RLS semua kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk NTT
15 Tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024

No	Kabupaten/Kota	TAHUN		Meningkat/ Menurun
		2023	2024	
Kabupaten				
1	Sumba Barat	6.92	7,17	0,25
2	Sumba Timur	7.57	7.77	0,02
3	Kupang	7.42	7.62	0,02
4	Timor Tengah Selatan	6.97	7,21	0,24
5	Timor Tengah Utara	8.16	8.17	0,01
6	Belu	7.39	7.50	0,11
7	Alor	8.45	8.61	0,16
8	Lembata	8.26	8.27	0,01
9	Flores Timur	8.04	8.06	0,02
10	Sikka	6.98	6.99	0,01
11	Ende	8.20	8.29	0,09
12	Ngada	8.82	8.83	0,01
13	Manggarai	7.63	7.91	0,28
14	Rote Ndao	7.82	7.83	0,01
15	Manggarai Barat	7.94	8,21	0,27
16	Sumba Tengah	7.00	7.23	0,23
17	Sumba Barat Daya	6.38	6.39	0,01
18	Nagekeo	8.14	8.23	0,09
19	Manggarai Timur	7.70	7.96	0,26
20	Sabu Raijua	6.98	6.99	0,01
21	Malaka	7.13	7.14	0,01
Kota				
1	Kota Kupang	11,61	11,64	0,03
Nusa Tenggara Timur		7,82	8,02	0,20

Sumber Data: BPS NTT, 2024



b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

- Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja
- Rata-rata Lama Sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
- Ekonomi
- Kemiskinan, beban tanggungan keluarga, dan kapasitas fiskal pemerintah daerah
- Sosial
- Budaya memperkerjakan anak, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, dan aksesibilitas
- Infrastruktur
Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta jarak tempuh sekolah
- Kebijakan pemerintah
Kebijakan pemerintah terkait pendidikan, seperti zonasi dan afirmasi pada proses PPDB
- Sumber daya
Ketersediaan sumber daya dan dana untuk pendidikan, serta kuantitas dan kualitas guru

Capaian RLS penduduk di NTT sebesar 8,02 pada tahun 2024 sebenarnya masih berada jauh di bawah standar 15 tahun yang dianjurkan PBB. Kenyataan ini sesuai dengan temuan bahwa angkatan kerja NTT didominasi oleh lulusan SD. Ini berarti jumlah tamatan SD yang melanjutkan ke SMP juga tidak banyak sehingga kecenderungan ini akan mengerucut ke atas. Data ini menunjukkan adanya celah cukup besar di antara APK dan APM bagi anak dan pemuda di NTT yang harus diintervensi pemerintah. Terutama bagi kelompok usia yang dapat memenuhi 15 tahun RLS di NTT.

3. **Harapan Lama Sekolah (HLS)**

a. **Capaian target Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dicapai oleh anak pada usia tertentu di masa depan. HLS dihitung untuk anak usia 7 tahun ke atas.

HLS Provinsi NTT pada tahun 2024 sebesar 13,23 tahun, naik 0,01 dibanding capaian tahun 2023 yaitu 13,22. Realisasi tahun 2024 belum mencapai target RLS Nasional sebesar 15 tahun. Pada akhir RPD diharapkan angka HLS dapat mencapai 15 tahun sehingga perlu upaya mengejar ketertinggalan gap sebesar 1,77 tahun. Angka HLS dan RLS: merupakan dua komponen utama penentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mewakili dimensi pendidikan. Pada target ini, diharapkan angka kelulusan baik SD, SMP, maupun SMA di NTT mengalami peningkatan. Secara langsung, ketika tingkat kelulusan SD, SMP dan SMA meningkatkan maka angka HLS dan RLS yang merupakan dua indikator penghitungan IPM akan ikut meningkat. HLS Provinsi NTT merupakan kontribusi HLS kabupaten/kota yang dapat digambarkan tahun 2023 dan 2024 pada tabel berikut.



Tabel
 Harapan Lama Sekolah Penduduk NTT
 15 Tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024

No	Kabupaten/Kota	TAHUN		Meningkat/ Menurun
		2023	2024	
Kabupaten				
1	Sumba Barat	13.26	13.40	0,14
2	Sumba Timur	12.86	12.87	0,01
3	Kupang	13.89	13.90	0,01
4	Timor Tengah Selatan	12.61	12.62	0,01
5	Timor Tengah Utara	13.35	13.36	0,01
6	Belu	12.31	12.32	0,01
7	Alor	12.28	12.48	0,02
8	Lembata	12.46	12.47	0,01
9	Flores Timur	12.95	12.96	0,01
10	Sikka	13.66	13.67	0,01
11	Ende	13.82	13.83	0,01
12	Ngada	12.74	12.75	0,01
13	Manggarai	13.71	13.73	0,02
14	Rote Ndao	13.22	13.23	0,01
15	Manggarai Barat	12.53	12.54	0,01
16	Sumba Tengah	13.13	13.14	0,01
17	Sumba Barat Daya	13.10	13.11	0,01
18	Nagekeo	12.59	12.69	0,01
19	Manggarai Timur	12.59	12.66	0,07
20	Sabu Raijua	13.18	13.19	0,01
21	Malaka	12.82	12.83	0,01
Kota				
1	Kota Kupang	16,44	16,54	0,01
Nusa Tenggara Timur		13,22	13,23	0,01

Sumber Data: BPS NTT, 2023

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Data ini menunjukkan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun di NTT yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,23 tahun atau setara dengan Diploma I. Kontribusi terbesar tidak tercapainya target HLS tahun 2024 disumbang oleh angka HLS Kabupaten Belu, Alor dan Lembata.

B. **Analisis Program dan Anggaran Perangkat Daerah yang Menunjang Pencapaian Target Kinerja**

Pencapaian sasaran ini didukung oleh 7 (tujuh) Program dengan dukungan anggaran sebesar: Rp.889.775.851.065,- (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam puluh lima rupiah). Realisasi Rp.314.313.041.688 (tiga ratus empat belas miliar tiga ratus tiga belas juta empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) atau mencapai 35,32% dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, melalui 6 (enam) program dengan rinciannya sebagai berikut:



Tabel Program, anggaran dan realisasi					
No	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian	Perangkat Daerah
1.	Pengelolaan Pendidikan	881.879.215.865	306.760.504.644	34,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Pengembangan Kurikulum	765.194.600	611.813.250	79,96	
3.	Pengembangan Kebudayaan	2.453.149.800	2.375.411.010	98,83	
4.	Pengembangan Kesenian Tradisional	2.988.572.800	2.875.594.784	96,23	
5.	Pembinaan Sejarah	145.480.000	145.480.000	100	
6.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.544.238.000	1.544.238.000	100	
Jumlah		889.775.851.065	314.313.041.688	35,32	

Sumber: LKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT tahun 2024

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Capaian sasaran Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan diukur melalui dua indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel Target dan Capaian Indikator Kinerja								
No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	2024			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	67,77	69	71,83	104,1	69	104,10
2.	Prevalensi Stunting	%	28,7	12	16,9	59,17	9-8,5	12,2-11,76
Rata-rata Capaian Sasaran						81,64		

Sumber data: BPS NTT 2024

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. **Usia Harapan Hidup**

a. **Capaian target Usia Harapan Hidup**

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu komponen pembentuk IPM sekaligus sebagai indikator dampak peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Usia Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan terus hidup atau rata-rata jumlah tahun yang dijalani seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang Tahun ke-X.



UHH masyarakat Nusa Tenggara Timur tahun 2024 adalah 71,83 tahun atau mencapai 104,1 % dari target akhir RPD yaitu 69 tahun dan mengalami kenaikan 4,3 poin dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 67,47 tahun. Jika dibandingkan dengan UHH Tingkat Nasional sebesar 72,39 maka terjadi gap sebesar 0,56 tahun dengan capaiannya sebesar 99,23 %.

UHH Provinsi NTT merupakan kontribusi dari UHH Kabupaten/Kota di NTT sebagaimana tabel berikut :

Tabel
Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2023-2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Umur Harapan Hidup Life Expectancy At Birth (Year)	
	2023	2024
Sumba Barat	71,16	71,37
Sumba Timur	71,31	71,57
Kupang	69,24	69,53
Timor Tengah Selatan	71,02	71,22
Timor Tengah Utara	70,75	71,02
Belu	73,97	74,30
Alor	70,55	70,88
Lembata	73,00	73,35
Flores Timur	73,57	73,91
Sikka	73,97	74,24
Ende	72,74	72,87
Ngada	74,12	74,43
Manggarai	72,20	72,44
Rote Ndao	69,55	69,81
Manggarai Barat	72,59	72,86
Sumba Tengah	69,21	69,46
Sumba Barat Daya	68,99	69,20
Nagekeo	72,24	72,51
Manggarai Timur	72,79	72,98
Sabu Raijua	66,46	66,65
Malaka	71,28	71,47
Kota/Municipality		
Kota Kupang	74,66	74,95
Nusa Tenggara Timur	71,57	71,83

Sumber Data: BPS NTT 2024, diolah

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi NTT untuk meningkatkan UHH melalui program Pembangunan Kesehatan melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan termasuk Kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori serta pemberantasan kemiskinan.

2. **Prevalensi Stunting**

a. **Capaian Target Prevalensi Stunting Menurut Data BPS**

Target Prevalansi stunting tahun 2024 di Provinsi NTT adalah 12% sedangkan realisasinya sebesar 16,9% (Data BPS) sehingga capaiannya

59,17%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 28,7% maka terjadi penurunan sebesar 11,8%. Namun jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 9-8,5% maka terdapat gap sebesar 7,9-8,4 % di tahun 2024.

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya di bawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Prevalensi stunting Provinsi NTT merupakan kontribusi dari kabupaten dan kota di NTT sebagaimana tabel berikut :

Tabel
Prevalensi Stunting menurut Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2023-2024

No	Kabupaten/Kota	2023		2024	
		Stunting	%	Stunting	%
1	Sumba Barat	1291	12	1787	23,6
2	Sumba Timur	2677	12	3365	15,1
3	Kupang	3872	13	3902	14
4	Timor Tengah Selatan	8924	22	9251	24,2
5	Timor Tengah Utara	4555	23	4802	25,9
6	Belu	1984	11	2351	13,9
7	Alor	1773	10	2260	13,1
8	Lembata	1045	12	673	7,9
9	Flores Timur	3184	18	3265	20
10	Sikka	3318	15	3375	19,3
11	Ende	1241	7	1796	10,5
12	Ngada	902	8	997	9,8
13	Manggarai	3481	13	2882	11,5
14	Rote Ndao	2764	20	2359	18,4
15	Manggarai Barat	1901	8	2608	11,8
16	Sumba Tengah	549	7	1036	15,3
17	Sumba Barat Daya	9762	32	6730	39,2
18	Nagekeo	728	7	928	9,6
19	Manggarai Timur	2195	9	1992	8,3
20	Sabu Raijua	1230	15	1626	20,8
21	Malaka	2409	16	2289	15,4
22	Kota Kupang	4019	17	4233	18,8
Provinsi NTT		63804	15	64507	16,9

Sumber Data: BPS NTT 2024



b. **Capaian Target Prevalensi Stunting Menurut Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI)**

Evaluasi status gizi balita secara nasional dilakukan dalam suatu survei yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Survei nasional terkait evaluasi status gizi yang terakhir dilaksanakan yaitu Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menggunakan metode pengukuran antropometri berat badan dan tinggi badan. Riskesdas dilaksanakan setiap lima tahun sekali, sedangkan pemerintah memerlukan monitoring dan evaluasi status gizi stunting balita setiap tahun berdasarkan indikator output intervensi gizi spesifik dan sensitif di tiap kabupaten/kota. Oleh karena itu sejak tahun 2019-2024 dilaksanakan SSGI untuk mengukur status gizi balita dan juga untuk menilai keberhasilan kinerja presiden dalam penanganan stunting tiap tahun.

Pada tahun 2024 target penurunan Stunting sebesar 12% menurut perhitungan e-PPGBM, namun dengan terbitnya hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 maka kebijakan nasional menyeragamkan target stunting berdasarkan hasil SKI tersebut, sehingga untuk tahun 2024 target penurunan stunting sebesar 35,5%. Sedangkan realisasi prevalensi Stunting tahun 2023 menurut SKI sebesar 37,9% selisih 2,2% dari target atau capaian 28,7% atau 29%. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 prosentase stunting di Indonesia sebesar 21,5% dan di Provinsi NTT prosentase stunting sebesar 37,9% mengalami kenaikan sebesar 2,4% jika dibandingkan dengan SSGI tahun 2022 yaitu sebesar 35,5%. Target Nasional tahun 2025 stunting mencapai 18,8% dan untuk Provinsi NTT sebesar 33,1%. Berdasarkan data ePPGBM tahun 2024 bulan Agustus capaian prosentase stunting di NTT adalah 18,3%.

Di Provinsi NTT untuk hasil SKI tahun 2023 prosentase stunting tertinggi adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 50,1 % dan terendah adalah Kabupaten Ngada yaitu sebesar 21,3 %. Ada tujuh kabupaten di Provinsi NTT yang prosentase stunting diatas 40 % yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan (50,1 %); Kabupaten Belu (48,1 %); Malaka (47,7 %), Sumba Barat Daya (44,3 %), Timor Tengah Utara (42,7 %) dan Sumba Barat (42,5 %) yang terendah selain Kabupaten Ngada adalah Nagekeo (24,9 %). Untuk sebaran data balita stunting di NTT dari 22 kabupaten/kota yang prosentasenya diatas 20 38 % ada sebanyak tiga kabupaten yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu 37,3%,

Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 25,9% dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 37,3%. Sedangkan kabupaten yang prosentase stunting antara 0 - 10 % ada 5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten Lembata (7,2%); Ende (7,8%), Ngada (9,8%), Nagekeo (8,8%), dan Manggarai Timur (8,5%).

Angka Prevalensi Stuting Berdasarkan Hasil SKI Tahun 2023 dapat terlihat pada table berikut ini.

Tabel
Situasi Stunting Provinsi NTT Tahun 2021 - 2023, SSGI & SKI

No	Kabupaten/Kota	SSGI 2021	SSGI 2022	SKI 2023	Target NTT (SSGI) 2023	Tren SSGI 2022 – SKI 2023
1	2	3	4	5	6	7=(4-5)
1.	Kab. Sumba Barat	37,0	36,0	42,5	27,1	NAIK
2.	Kab. Sumba Timur	28,8	32,2	26,3	21,2	TURUN
3.	Kab. Kupang	40,4	38,4	38,4	27,9	TETAP
4.	Kab. Timor Tengah Selatan	48,3	45,2	50,1	36,2	NAIK
5.	Kab. Timor Tengah Utara	46,7	38,7	42,7	34,7	NAIK
6.	Kab. Belu	39,9	36,6	48,1	29,3	NAIK
7.	Kab. Alor	44,8	36,7	39,3	33,4	NAIK
8.	Kab. Lembata	31,7	31,8	35,1	23,1	NAIK
9.	Kab. Flores Timur	23,4	27,4	37,2	17,4	NAIK
10.	Kab. Sikka	26,6	32,7	33,3	19,9	NAIK
11.	Kab.Ende	27,2	35,1	27,5	20,4	TURUN
12.	Kab.Ngada	29,0	31,2	21,3	21,3	TURUN
13.	Kab.Manggarai	33,1	33,7	36,8	24,5	NAIK
14.	Kab.Rote Ndao	40,1	38,4	39,8	28,1	NAIK
15.	Kab.Manggarai Barat	38,5	38,9	36,2	27,9	TURUN
16.	Kab.Sumba Tengah	30,4	29,6	39,5	24,9	NAIK
17.	Kab.Sumba Barat Daya	44,0	39,8	44,3	24,8	NAIK
18.	Kab.Nagekeo	28,1	30,5	24,9	20,8	TURUN
19.	Kab.Manggarai Timur	42,9	40,5	43,7	31,8	NAIK
20.	Kab.Sabu Raijua	33,9	30,6	36,9	23,9	NAIK
21.	Kab.Malaka	31,4	32,9	47,7	23,0	NAIK
22.	Kota Kupang	26,1	19,2	29,9	18,8	NAIK
Nusa Tenggara Timur		37,8	35,3	37,9	26,1	NAIK

Sumber : SSGI 2021, SSGI 2022 & SKI 2023

c. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Keberhasilan penurunan Prevalensi stunting di Provinsi NTT dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan berbagai upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Prevalensi stunting menjadi prioritas dari RPJMD / RPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kolaborasi lintas sektor dan kolaborasi bersama pemerintah daerah Kab/Kota,



pengembangan inovasi pencegahan stunting, kerjasama dengan Badan PBB baik bilateral dan orientasi sosial kemasyarakatan dan lembaga keagamaan serta adanya dukungan dana desa.

B. Analisis program, anggaran dan perangkat daerah yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja

Pencapaian sasaran ini didukung oleh 3 (tiga Program dengan dukungan anggaran sebesar: Rp. 180.628.270.659 (*seratus delapan puluh milyar enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh Sembilan rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 161.450.455.326,48 (*Seratus enam puluh satu milyar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah empat puluh delapan sen*) atau mencapai 89,38%, sebagaimana tabel berikut.

Tabel
Program, anggaran dan realisasi

No	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian %	Perangkat Daerah
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	134.607.571.703	127.984.879.175	97	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	18.898.460.100	13.026.708.546,93	68,93	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	248.586.000	216.443.830,2	87,07	
	Jumlah	153.754.617.803	141.228.031.551	91,85	

Sumber: LKIP Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil 2024

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata capaian sasaran “**Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan**” sebesar **81,64%** dengan kategori **Berhasil**.

Tujuan 3 : **MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN DENGAN MEMPERHATIKAN ASPEK LINGKUNGAN HIDUP, KEWILAYAAN DAN MITIGASI BENCANA**

Sasaran Strategis 1 : **Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

Sasaran ini, mencakup dua (2) indikator sebagai berikut:



Tabel Target dan Capaian Indikator Kinerja								
No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	2024			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Presentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	73,25 (1.941,125 Km) 73,27 % (1.969,04 Km) data survey kondisi akhir tahun 2023	86,86 (2.334,20 Km) 73,78 (1.955,365 Km) (ruas jalan provinsi 2.687,31 Km)				
2.	Ratio elektrifikasi	%	95,27	93	96,35	103,60	95	101,42
Rata-rata Capaian						94,27		

Sumber data: LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2024 dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT Tahun 2024

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. **Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap**
 - a. **Capaian Target Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap**

Pada tahun 2024 target persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap 2.334,20 Km atau 86,86%, realisasi 1.955,365 Km atau 73,78% dari total panjang jalan provinsi sepanjang 2.650 km. Untuk mendapatkan data kondisi jalan mantap Tahun 2024 telah dilakukan survey kondisi jalan kewenangan provinsi di akhir tahun 2024 ditambah penanganan tahun 2024. Kondisi jalan mantap sepanjang 1.827,07 Km atau 67,98% terdiri dari kondisi baik sepanjang 1.233,28 Km atau 45,90% dan kondisi sedang sepanjang 593,79 Km atau 22,09%, sedangkan kondisi jalan tidak mantap sepanjang 18,23 Km atau 26,3% terdiri dari rusak ringan sepanjang 342,53 Km atau 12,75% dan rusak berat sepanjang 517,71 Km atau 19,27%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 73,25% atau 1.941,125km , maka terjadi peningkatan jalan mantap sebesar 0,61% atau 14.24 km. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2026 sebesar 86,86% atau 2.334,20 Km maka capaian panjang jalan provinsi kondisi mantap baru mencapai 2.251,169 km Km (84,94%).
 - b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi



mantap belum mencaai target, adapun kendala yang menyebabkan belum tercapainya target presentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap antara lain disebabkan oleh :

1. Konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah belum berjalan baik, karena capaian target pembangunan infrastruktur jalan yang rendah dan kurangnya pemeliharaan jalan.
2. Terjadinya penurunan panjang jalan dalam kondisi mantap secara umum disebabkan oleh pola pelaksanaan kegiatan penanganan jalan yang kurang efektif/efisien dimana tidak teralokasinya anggaran yang cukup untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan lebih berfokus pada kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi.
3. Berdasarkan data penanganan jalan Provinsi tahun 2024 dana pemeliharaan jalan (kondisi mantap) jumlah dana teralokasi sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan, hal ini berkaitan dengan kemampuan fiskal daerah.
4. Beban pemerintah Provinsi dalam mewujudkan konektivitas yang baik membutuhkan biaya besar dan rentang kendali dalam penyelenggaraan jalan relative luas, menyebabkan pelaksanaan konstruksi, pengendalian dan pengawasan kurang optimal.

c. Solusi

1. Secara simultan mengusulkan anggaran untuk rekonstruksi jalan/ peningkatan jalan terhadap GO dan GO Plus yang telah dibangun sesuai anggaran yang tersedia dan peningkatan kapasitas penyedia jasa akan dikoordinasikan dengan asosiasi terkait.
2. Penambahan panjang ruas jalan dalam penanganan lebih ditingkatkan untuk memenuhi target yang ditetapkan.
3. Terkait kerusakan dini pada konstruksi GO atau GO Plus sesuai skenario penanganan jalan tuntas yang telah diajukan maksimal 2 (dua) tahun sudah harus ditingkatkan dengan perkerasan berpenutup aspal.

2. **Rasio Elektrifikasi**

a. **Capaian Target Rasio Elektrifikasi**

Target Rasio Elektrifikasi pada tahun 2024 sebesar 93%, dengan realisasinya sebesar 96,35% atau mencapai 103,60%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 95,27%, maka realisasi Rasio Elektrifikasi di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,13%. Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir RPD 2026 sebesar 95%, maka capaian realisasi Rasio Elektrifikasi sudah melebihi target yaitu sebesar 101,42%.



b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator rasio elektrifikasi meningkat dari target yang ditetapkan, adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini pada tahun 2024, yaitu :

- Melakukan verifikasi dan sinkronisasi data antara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan BAPPENAS yaitu terkait data 3T dan Kementerian Sosial terkait Basis Data Terpadu (BDT) yang nantinya menjadi rujukan untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan hibah bantuan meter gratis bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun jumlah penerima bantuan meteran gratis sebanyak 145 unit, antara lain di Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 60 unit, Kabupaten Kupang sebanyak 40 unit dan Kabupaten TTS sebanyak 45 unit.
- Melaksanakan belanja hibah instalasi sambungan rumah bagi masyarakat tidak mampu di 10 kabupaten sebanyak 1.035 unit.

B. Analisis Program, Anggaran dan Perangkat Daerah yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan 2 (dua) Program yaitu Program Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT. Rincian terkait jumlah program, alokasi dan realisasi dana menurut Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel
Jumlah Program, Jumlah Dana (alokasi dan realisasi)
menurut Perangkat Daerah

No.	Nama Perangkat Daerah	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Program Penyelenggaraan Jalan	107.123.364.804,-	98.875.991.607,-	92,30
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Program Pengelolaan Kelistrikan	2.701.819.000,-	565.579.818,-	20,93

Sumber: LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis “Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan



pelayanan dasar” sebesar **94,27%**. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh pelaksanaan 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 107.123.364.804,- dengan realisasi sebesar Rp. 98.875.991.607,- atau mencapai 92,30% dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.701.819.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 565.579.818,- atau mencapai 20,93%. Berdasarkan data rerata realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi NTT **Sangat Berhasil** mencapai sasaran strategis pada target akhir RPD Tahun 2026.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Daerah

Sasaran ini didukung satu indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	2024			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	74,18	79,87 <i>Target ditetapkan pada saat Rakortekbang dengan Birocan KLHK untuk IKLH 2024</i>	75	93,90	74,28	100,96
Rata-rata Capaian						93,90		

Sumber data: LKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, 2024

A. Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

a. **Capaian Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Pada tahun 2024 target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 79,87 poin, realisasi sebesar 75 poin atau mencapai 96,35%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 74,18 poin, maka capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,82 poin. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2026 sebesar 74,28 poin maka capaiannya sebesar 100,96%.

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami

peningkatan, adapun upaya yang dilakukan, adalah : Pemanfaatan perhutanan sosial dan MHA; Cakupan penanaman lahan kritis; Perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA; Pengolahan limbah B3; Pemanfaatan dokumen lingkungan hidup dan pelayanan pengujian laboratorium.

Upaya ini secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut dan penutupan lahan yang berpengaruh langsung terhadap nilai Indeks kualitas lingkungan hidup.

B. Analisis Program, Anggaran dan Perangkat Daerah yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas tata ruang dan lingkungan hidup daerah, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan Program Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rincian terkait jumlah program, alokasi dan realisasi dana menurut Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel
Jumlah Program, Jumlah Dana (alokasi dan realisasi)
menurut Perangkat Daerah

No.	Nama Perangkat Daerah	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	740.854.120,-	578.644.756,-	78,11

Sumber: LKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis “meningkatnya kualitas tata ruang dan lingkungan hidup daerah” sebesar **93,90%**. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh pelaksanaan 1 (satu) program oleh 1 (satu) Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 740.854.120,- dan realisasi sebesar Rp. 578.644.756,- atau mencapai 78,11%. Berdasarkan data rerata realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi NTT **Sangat Berhasil** mencapai sasaran strategis pada target akhir RPD Tahun 2026.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah dan Adaptasi Terhadap Perubahan Lingkungan

Sasaran ini mencakup 1 (satu) indikator sebagai berikut:



Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	2024			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Indeks resiko bencana	Poin	139,23	134	132	101,49	135	102,98
Rata-rata Capaian						101,49		

Sumber data: LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Indeks Risiko Bencana

a. Capaian Target Indeks Risiko Bencana

132 poin atau sebesar 101.49%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 139,23 poin, maka capaian indeks risiko bencana di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 7,23 poin. Jika dibandingkan dengan Target Akhir RPD 2026 sebesar 135 poin maka capaiannya sebesar 102,98%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator Indeks Risiko Bencana mengalami penurunan. Hal ini berdampak pada peningkatan kinerja indeks resiko bencana. Peningkatan kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:

Membangun kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dengan membuat pedoman/dokumen penanganan ancaman bencana pada saat tanggap darurat bencana agar berlangsung cepat dan efektif melalui pengerahan memobilisasi sumber daya semua pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dengan membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermwanaan.

Pemasangan rambu peringatan dini bencana di 5 (lima) Kabupaten yaitu :

- 1. Kabupaten Malaka sebanyak 15 Buah;
- 2. Kabupaten Lembata sebanyak 15 Buah;Kabupaten Kupang sebanyak 10 buah;
- 3. Kabupaten TTS sebanyak 10 buah;dan
- 4. Kabupaten Rote Ndao sebanyak 14 buah.
 - Membentuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebanyak 150 Desa/Kelurahan di 13 Kabupaten dan 1 Kota.
 - Melatih 85 orang di BPBD Kabupaten TTS, TTU, Belu, Malaka,



Rote Ndao, Sumba Timur, Ende, Ngada. Pelatihan yang dilakukan adalah pemberian pembekalan pengetahuan gladi simulasi dan praktek di lapangan.

- Mendistribusi Buffer Stock Logistik di 13 Kabupaten/Kota diantaranya adalah :
 1. Kabupaten Kupang (500 Kg Beras);
 2. Kabupaten TTS (500 Kg Beras);
 3. Kabupaten TTU (500 Kg Beras);
 4. Kabupaten Belu (500 Kg Beras);
 5. Kabupaten Rote Ndao (500 Kg Beras);
 6. Kabupaten Sabu Raijua (500 Kg Beras);
 7. Kabupaten Malaka (500 Kg Beras);
 8. Kabupaten Flores Timur (500 Kg Beras);
 9. Kabupaten Ende (500 Kg Beras);
 10. Kabupaten Sumba Barat Daya (500 Kg Beras);
 11. Kabupaten Manggarai (500 Kg Beras);
 12. Kabupaten Manggarai Barat (500 Kg Beras);dan
 13. Kabupaten Sumba Timur (500 Kg Beras).

B. Analisis Program, Anggaran dan Perangkat Daerah yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan Program Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rincian terkait jumlah program, alokasi dan realisasi dana menurut Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel
Jumlah Program, Jumlah Dana (alokasi dan realisasi)
menurut Perangkat Daerah

No.	Nama Perangkat Daerah	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	1.233.524.400,-	1.153.721.045,-	93,53

Sumber: LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan” sebesar 101,49%. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh pelaksanaan 1 program oleh 1 perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.233.524.400,- dan realisasi sebesar Rp. 1.153.721.045,- atau mencapai 93,53%. Berdasarkan data rerata realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi NTT Sangat Berhasil mencapai sasaran strategis pada target akhir RPD Tahun 2026.



Tujuan 4 : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital, efektif, lincah dan kolaboratif. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Keberhasilan pelaksanaan tujuan keempat Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT tahun 2024-2026 diukur dengan pencapaian target kinerja dari sasaran strategis Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Sasaran strategis tersebut mencakup 7 (tujuh) indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA
Strategis 1: PENYELENGARAAN PEMERINTAH YANG BERORIENTASI PELAYANAN, AKUNTABEL, KOMPETEN, HARMONIS

Capaian sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat diukur melalui 7 (Tujuh) indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5 RPD 2024-2026								
No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2023	2024			Target Akhir RPD	Capaian Terhadap RPD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	66,18	64	76,65	119,76	67	114,40
2.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP (100)	WTP	WTP
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat	Predikat B 64,59	Predikat A (>80-90)	63,68 Predikat B	79,6-70,75	Predikat A (>80-90)	79,6-70,75
4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	3,83	2,3	3,89	169,13	2.7	144,07
5.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	76,99	85	94,30 (Informatif)	110,94	95	99,26
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	86,32	85	86,32*) (Baik)	101,55	90	95,91
7.	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	77,83	83	77,83*)	93,77	83	93,77
Rata-rata Capaian Sasaran						109,14 (Sangat Baik)		

Sumber data: Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, BPS NTT, Badan Keuangan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika, diolah
*) data tahun 2023

A. Analisis terhadap capaian indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi

a. Capaian Target Indeks Reformasi Birokrasi

Target Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 sebesar 64,00 poin dengan realisasi sebesar 76,65 poin atau mencapai 119% dari target. Hasil evaluasi ini



mempedomani Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan menggunakan metode *double track* yaitu Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 67,00 poin maka terjadi peningkatan kinerja sebesar 9,65 poin atau 114%.

b. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja**

Realisasi nilai indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 melampaui target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2024-2026 sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023.
- 2) Seluruh kegiatan utama pada rencana aksi RB general yang diamanatkan dalam Road Map RB Nasional telah terkawal. indikator kegiatan utama yang ditetapkan sebenarnya sudah melihat baseline/realisasi tahun sebelumnya.
- 3) Penyusunan rencana aksi RB tematik telah mengakomodir penyusunan kerangka logis didalamnya.
- 4) Adanya komitmen pimpinan dalam menetapkan target capaian reformasi birokrasi yang jelas.
- 5) Implementasi rencana aksi dalam unit kerja, dan
- 6) Pemilihan program berdampak pada capaian sasaran RB.

2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

a. **Capaian Target Opini BPK**

Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dirilis oleh BPK-RI tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini sesuai dengan target pemerintah provinsi NTT yakni WTP. Jika dibandingkan dengan target WTP pada tahun terakhir RPD tahun 2026, capaian kinerja tahun 2024 telah memenuhi target.

b. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja**

Realisasi opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 mencapai target WTP. Pemberian opini ini merupakan bentuk apresiasi terhadap laporan keuangan



pemerintah Provinsi NTT. Beberapa catatan terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun 2024 yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut:

- 1) Rendahnya pengendalian internal masing-masing PD;
- 2) Kurangnya komitmen manajemen dalam melakukan rekomendasi hasil pengawasan.

Solusi :

Diklat penjenjangan bagi pejabat fungsional auditor maupun P2UPD.

Hal-hal yang mendasari Opini WTP oleh BPK-RI yang di terima oleh Pemerintah Provinsi antara lain disebabkan oleh :

- 1) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT tahun 2023 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua telah ditetapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan,
- 2) Pelaksanaan program kegiatan dan pelaporan keuangan tahun 2023 telah dilaksanakan dengan efektif.

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja

a. **Capaian Target Nilai Akuntabilitas Kinerja**

Target nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 adalah Predikat A (>80-90) dengan realisasi sebesar Predikat B (63,86) atau mencapai 79,6-70,75%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 64,59 (B) maka terjadi penurunan sebesar 0,91 poin atau turun sebesar -1,12%. Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir RPD Predikat A (>80-90), maka terdapat gap sebesar 16,14-26.32 poin.

b. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja**

Realisasi nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, masih ditemukan kinerja yang belum berorientasi pada hasil dan belum spesifik sehingga menimbulkan dwimakna.
- 2) RPD yang disusun belum disertai dengan indikator tujuan sehingga ketercapaian kondisi akhir periode RPD belum terlihat;
- 3) Pada dokumen rencana strategis dan PK PD, belum seluruhnya kinerja berorientasi hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang *specific, measureable, Achievable, Relavance, Timebound* (SMART) dan cukup, serta belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi.
- 4) Pohon kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip logis/logical *framework* yang menggambarkan hubungan sebab



akibat serta belum menggambarkan *critical succes factor* (CSF) yang secara langsung mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan mengacu pada Peraturan Menteri Pandayagunan Aparatur Negara dan Reformasih Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021;

- 5) Belum seluruhnya melakukan identifikasi *crosscutting* kinerja sebagai bentuk sharing outcome antar PD sebagai upaya untuk mempercepat tercapainya kinerja utama di level Provinsi maupun PD.
- 6) Pedoman teknis perencanaan dan atau teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja masih berbentuk rancangan
- 7) IKU belum memuat sumber data dan penanggung jawab data sehingga belum diketahui secara detail dari mana data kinerja diperoleh. Selain itu masih terdapat data yang belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan sehingga data kinerja yang dihasilkan dari pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.
- 8) Rencana aksi dan laporan realisasi belum seluruhnya terunggah pada esr.menpan.go.id. Hal ini mengakibatkan progress atas ketercapaian kinerja setiap triwulannya tidak tergambar dengan baik.
- 9) Pelaksanaan monev PD diaplikasi <https://e-kinerja.bapperidantt.com> masih berorientasi pada penyerapan anggaran, realisasi program serta kegiatan, namun belum mencakup capaian kinerja karena saat ini menu capaian kinerja masih dalam proses.
- 10) LPPD yang diunggah di esr.menpan.go.id belum dilengkapi dengan perbandingan realisasi kinerja dengan benchmark nasional atau provinsi.
- 11) Kualitas laporan kinerja antar PD berbeda, karena masih ditemukan laporan kinerja yang belum dilengkapi dengan detail atas faktor hambatan/pendukung, Solusi atas permasalahan dan analisis efisiensi ketercapaian kinerja.
- 12) Penetapan target kinerja tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun 2023.
- 13) Laporan hasil evaluasi belum sepenuhnya memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup konkrit pada setiap komponen evaluasi AKIP internal.
- 14) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja,

hal ini ditunjukkan dari masih terdapat sebagian kinerja yang capaian target kinerjanya belum tercapai.

c. Solusi

Adapun Solusi dari factor-faktor penghambat tercapainya target perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan reviu atas kinerja yang ada pada dokumen RPD, agar sepenuhnya berorientasi hasil dan spesifik sehingga tidak menimbulkan dwimakna
2. Memastikan perencanaan kinerja disertai dengan indikator tujuan sehingga ketercapaian kondisi akhir periode terlihat.
3. Melakukan reviu dokumen rencana strategis dan PK PD, agar memuat kinerja yang berorientasi hasil dan dilengkapi dengan indicator kinerja yang SMART dan cukup serta menjawab isu strategis yang dihadapi.
4. Menyusun dan memastikan pohon kinerja pada level provinsi dan seluruh PD telah memenuhi prinsip logis/*logical framework* yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan *critical success factor* (SCF) yang secara langsung mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan mengacu pada PERMENPAN RB Nomor 89 Tahun 2021.
5. Melakukan identifikasi *crosscutting* kinerja sebagai bentuk *sharing outcome* dalam Upaya untuk mencapainya kinerja utama di level Provinsi maupun PD
6. Memformalkan dan mengimplementasikan atas rancangan pedoman teknis perencanaan dan atau teknis pengukuran & pengumpulan data kinerja.
7. Melakukan penguatan formulasi dan pengumpul data IKU dengan melengkapi seluruh IKU PD dengan informasi atas sumber dan penanggung jawab data sehingga diketahui secara detail dari mana data kinerja diperoleh, serta memastikan Kembali pengukuran kinerja yang dilakukan disertai dengan data yang relevan sehingga data kinerja yang dihasilkan dari pengukuran capaian kinerja dapat diandalkan.
8. Melakukan unggah dokumen SAKIP ke dalam esr.menpan.go.id diantaranya rencana aksi tahun berkenaan dan laporan realisasi seluruh PD agar progress atas ketercapaian kinerja setiap triwulannya dapat tergambar dengan baik.
9. Memastikan aplikasi monitoring dan evaluasi yang dimiliki bukan hanya berorientasi pada penyerapan anggaran,realisasi program serta kegiatan namun juga mencakup monitoring dan evaluasi

kerja, sehingga diketahui ketercapaian kinerja secara berkala dan perbaikan strategi yang diperlukan.

10. Memastikan LPPD menyajikan data perbandingan realisasi kinerja dengan *benchmark* nasional atau Provinsi. Selain itu melengkapi setiap ketercapaian indikator kinerja dilengkapi dengan narasi yang detail atas faktor hambatan/pendukung khususnya untuk indikator yang belum ada realisasi.
11. Meningkatkan kualitas laporan kinerja seluruh PD dengan dilengkapi detail atas faktor hambatan/pendukung, Solusi atas permasalahan, dan analisis efisiensi ketercapaian kinerja. Selain itu dapat disusun *template* standar laporan kinerja dan diimplementasikan ke seluruh PD.
12. Memaksimalkan penggunaan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja kedepan diantaranya dalam penentuan target.
13. Inspektorat selaku yang melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar memberikan temuan dan rekomendasi yang konkrit untuk setiap komponen evaluasi.
14. Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan capaian kinerja.

4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

a. Capaian Target Indeks SPBE

Target nilai indeks SPBE Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada RPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024 sebesar 2,3 poin, dengan realisasi sebesar 3,89 poin atau mencapai 169,13% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 3,83, maka terdapat peningkatan sebesar 0,06 poin atau 1.56%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 2,7, maka capaian tahun 2024 telah melampaui sebesar 1,19 poin atau 144,07% sehingga Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi nilai indeks SPBE Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 melampaui target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya peran kerja kolaboratif antara perangkat daerah dan Dinas Kominfo dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang ada di Perangkat Daerah mulai dioptimalkan terlibat dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan TIK.



- 3) Beberapa aplikasi umum berbagi pakai mulai diterapkan secara maksimal dan terintegrasi pada semua perangkat daerah antara lain bidang perencanaan dan penganggaran, bidang pengadaan barang dan jasa, bidang kepegawaian, bidang perizinan dan pengaduan masyarakat.
- 4) Penggunaan aplikasi *e-purchasing* dan SRIKANDI telah diperjanjikan dalam Kontrak kinerja antara Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan para Kepala Perangkat Daerah.
- 5) Penerapan aplikasi khusus terintegrasi pada semua perangkat daerah antara lain sistem absensi elektronik, tata naskah dinas elektronik (Srikandi) dan penggunaan tanda tangan elektronik sudah diimplementasikan.
- 6) Telah tersedianya instrumen regulasi terkait rancangan pembangunan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka menyelaraskan pembangunan SPBE pada instansi Perangkat Daerah.
- 7) Telah adanya regulasi yang mengatur terkait peta proses bisnis, infrastruktur, data dan informasi, layanan aplikasi serta keamanan SPBE.

5. **Tingkat Keterbukaan Informasi Publik**

a. **Capaian Target Tingkat Keterbukaan Informasi Publik**

Target Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 sebesar 85 poin, dengan realisasi sebesar 94,30 poin dengan predikat Informatif atau mencapai 110,94% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 77,06, maka capaian terjadi peningkatan sebesar 17,24 poin atau 22,37%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 sebesar 95, maka tingkat keterbukaan informasi publik hanya terpaut 0,7 poin dari target akhir RPD.

b. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja**

Realisasi target nilai indeks keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 mencapai target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya upaya daerah untuk menghadirkan pemerintah yang lebih terbuka terus dilakukan secara berkelanjutan dengan dimasukkannya Tingkat Keterbukaan Informasi Publik ke dalam salah satu indikator penunjang pimpinan Perangkat Daerah sehingga keikutsertaan PD dalam pelaksanaan Monev SAQ (*Self Assesment quistionnaire*).

- 2) Aktifnya website PPID Utama, PPID pelaksana, website nttprov dan media sosial masing-masing PD dalam mempublikasikan program/kegiatan untuk mendukung Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik.
- 3) Kerjasama dan kolaborasi TIM Monev SAQ bersama PD yang sangat baik

6. Indeks Kepuasan Masyarakat

a. Capaian Target Indeks Kepuasan Masyarakat

Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 sebesar 85 poin, dengan realisasi sebesar 86,56*) poin yang merupakan angka tahun 2023 atau mencapai 101,55% dari target. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 90, maka terdapat gap sebesar 3,44 poin.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 melampaui target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- 1) Perangkat Daerah telah menerapkan pelayanan publik yang berkualitas
- 2) Kualitas sarana dan prasarana pada unit penyelenggara layanan publik sudah memadai.
- 3) Kompetensi dan profesionalisme pelaksana pada unit penyelenggara layanan publik cukup baik.

7. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

a. Capaian Target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Target nilai IDI Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 adalah 83. Berhubungan sampai dengan bulan Maret tahun 2025 Badan Pusat Statistik Provinsi NTT belum merilis data IDI tahun 2024, maka dalam analisis ini digunakan data capaian tahun 2023 sebesar 77,83. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 83, maka terdapat gap sebesar 5.17 poin.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Realisasi nilai IDI Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan berada pada kategori rendah, hal ini disebabkan karena prevalensi *hearing*, audiensi, dan berbagai



forum DPR (rapat dengar pendapat umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dan sebagainya) di DPRD Provinsi NTT terhadap total anggota DPRD Provinsi NTT masih rendah.

- 2) Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN maupun APBD oleh pemerintah berada pada kategori rendah, hal ini disebabkan karena tidak tersedianya informasi APBD berupa Perda tentang APBD, ringkasan RKA-SKPD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, laporan realisasi anggaran SKPD, LKPD yang sudah audit (Y-1), dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah di website Pemerintah Provinsi NTT
- 3) Indeks Pelayanan Publik yang masih rendah antara lain disebabkan oleh:
- 4) Belum semua penyelenggara layanan publik menerapkan Standar Pelayanan Publik;
- 5) Rendahnya Profesionalisme SDM (Kompetensi, Responsivitas, Kode Etik, Pemberian Penghargaan dan Sanksi, dan Budaya Pelayanan);
- 6) Keterbatasan sarana prasarana (kenyamanan ruang tunggu dan fasilitas lainnya, sarana prasarana bagi yang berkebutuhan khusus, sarana prasarana penunjang lain, dan sarana *front office*);
- 7) Masih rendahnya Sistem Informasi Pelayanan Publik meliputi Sistem Informasi Elektronik dan Sistem Informasi Non Elektronik;
- 8) Masih terbatasnya sarana dan media konsultasi dan pengaduan serta rubrik, dokumentasi, dan publikasi konsultasi dan pengaduan yang mudah diakses;
- 9) Masih terbatasnya inovasi pelayanan publik yang dikembangkan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
- 10) Pemenuhan hak-hak pekerja berada pada kategori sedang, hal ini disebabkan karena masih cukup banyak pekerja yang belum memiliki jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan dana pensiun.
- 11) Kesetaraan dalam pelayanan dasar Provinsi berada pada kategori sedang, hal ini disebabkan karena pemenuhan kebutuhan akan akses terhadap pelayanan dasar (air minum, sanitasi dasar, fasilitas penyehatan dasar, Angka Partisipasi Murni pendidikan SD, SMP, SMA) untuk semua rumah tangga masih rendah.
- 12) Kinerja lembaga legislatif berada pada kategori rendah, hal ini disebabkan karena jumlah Peraturan Daerah yang disahkan belum dapat memenuhi target Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang telah direncanakan.

Realisasi nilai IDI Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan berada pada kategori rendah, hal ini disebabkan karena prevalensi *hearing*, audiensi, dan berbagai forum DPR (rapat dengar pendapat umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dan sebagainya) di DPRD Provinsi NTT terhadap total anggota DPRD Provinsi NTT masih rendah.
- 2) Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN maupun APBD oleh pemerintah berada pada kategori rendah, hal ini disebabkan karena tidak tersedianya informasi APBD berupa Perda tentang APBD, ringkasan RKA-SKPD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, laporan realisasi anggaran SKPD, LKPD yang sudah audit (Y-1), dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah di website Pemerintah Provinsi NTT
- 3) Indeks Pelayanan Publik yang masih rendah antara lain disebabkan oleh:
 - Belum semua penyelenggara layanan publik menerapkan Standar Pelayanan Publik;
 - Rendahnya Profesionalisme SDM (Kompetensi, Responsivitas, Kode Etik, Pemberian Penghargaan dan Sanksi, dan Budaya Pelayanan);
 - Keterbatasan sarana prasarana (kenyamanan ruang tunggu dan fasilitas lainnya, sarana prasarana bagi yang berkebutuhan khusus, sarana prasarana penunjang lain, dan sarana front office);
 - Masih rendahnya Sistem Informasi Pelayanan Publik meliputi Sistem Informasi Elektronik dan Sistem Informasi Non Elektronik;
 - Masih terbatasnya sarana dan media konsultasi dan pengaduan serta rubrik, dokumentasi, dan publikasi konsultasi dan pengaduan yang mudah diakses;
 - Masih terbatasnya inovasi pelayanan publik yang dikembangkan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
- 4) Pemenuhan hak-hak pekerja berada pada kategori sedang, hal ini disebabkan karena masih cukup banyak pekerja yang belum memiliki jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan dana pensiun.
- 5) Kesetaraan dalam pelayanan dasar Provinsi berada pada kategori sedang, hal ini disebabkan karena pemenuhan kebutuhan akan akses terhadap pelayanan dasar (air minum, sanitasi dasar, fasilitas penyehatan dasar, Angka Partisipasi Murni pendidikan SD,

SMP, SMA) untuk semua rumah tangga masih rendah.

- 6) Kinerja lembaga legislatif berada pada kategori rendah, hal ini disebabkan karena jumlah Peraturan Daerah yang disahkan belum dapat memenuhi target Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang telah direncanakan.

B. Analisis Program dan Anggaran Perangkat Daerah yang Menunjang Pencapaian Target Kinerja

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari Tujuan Keempat RPD yaitu **Birokrkasi Yang Berorienrtasi Pelayanan ,Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan 33 Program pada tahun 2024 yang dilaksanakan oleh 18 Perangkat Daerah. Rincian terkait jumlah program, alokasi dan realisasi dana menurut Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Jumlah Program, Jumlah dana (alokasi dan realisasi)
Menurut Perangkat Daerah

NO	Nama Perangkat Daerah	Program	Anggaran	Realisasi	%
			(Rp.)	(Rp.)	
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1,172,000,000	1,165,662,000	99,46
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6,434,123,470	6,203,544,597	96,42
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100,000,000	53,928,000	53,93
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2,452,950,010	2,249,093,640	91,69
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Poltik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	353,583,374,600	306,885,357,280	86,79
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	209,474,000	105,440,150	50,34
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	379,586,000	312,313,500	82,28
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penangan Konflik Sosial	1,045,367,000	933,775,200	89,33
3	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Program Penyelenggaraan Pengawasan	5,323,686,988	4,964,130,440	93,26
		Program Kebijakan , Pendampingan dan Asistensi	2,735,142,068	2,276,260,143	83,22
4	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	632,900,000	598,887,430	94,63
		Program Kesejahteraan Rakyat	9,306,922,400	7,554,054,245	81,17
5	Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1,588,012,265	1,524,239,950	95,98



NO	Nama Perangkat Daerah	Program	Anggaran	Realisasi	%
			(Rp.)	(Rp.)	
6	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Program Perekonomian dan Pembangunan	959,6000,000	773,715,990	80,63
		Program Administrasi Pembangunan	213,735,424	212,896,380	99,61
7	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Program Kebijakan dan Pelayanan PBJ	6,589,605,381	6,443,311,641	97,77
8	Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Program Penataan Organisasi	1,118,233,027	1,043,251,500	93,29
9	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,334,973,336	1,332,026,386	99,78
10	Biro Umum Setda Provinsi NTT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48,427,984,952	40,482,160,362	83,59
11	Sekretariat DPRD Provinsi NTT	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	72,758,097,636	68,422,331,532	89,14
12	Bappelitbangda Provinsi NTT	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,657,413,826	1,093,097,779	65,95
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah	4,161, ,874,675	1,814,309,403	43,59
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,337,745,842	492,790,153	36,84
13	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Program Kepegawaian Daerah	3,588,756,565	3,217,189,828	89,64
14	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	918,252,191,453	752,483,856,689	81,95
15	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,230,950,000	1,967,984,760	40,45
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	15,032,905,200	13,952,883,996	92,82
16	Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT	Program Pengembangan SDM	7,004,184,000	4,759,528	67,96
17	Badan Penghubung Provinsi NTT	Program Pelayanan Penghubung	1,079,006,000	1,007,884,844	93,41
18	Badan Perbatasan Provinsi NTT	Program Pengelolaan Perbatasan	1,485,150,000	1,189,065,704	80,06
Jumlah			1,477,670,471,443	1,230,760,203,050	83,29

Sumber data: LKIP PD PROV. NTT 2024, diolah

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencaian sasaran strategis “**Birokrasi Yang Berorientasi Pelayanan ,Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif Dan Kolaboratif**” sebesar **109,14 (Sangat Baik)**. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh pelaksanaan 33 program oleh 18 Perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar, Rp. 1,477,670,471,443 dan realisasi Rp. 1,230,760,203,050 atau mencapai 83,29%. Berdasarkan data rerata realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi NTT berhasil mencapai sasaran strategis pada Tujuan ke empat RPD 2024-2026.

Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024 sesuai misi dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tujuan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024

NO	TUJUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SKALA ORDINAL
1.	Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri, Makmur, Sejahtera dan Berkeadilan Sosial	95,97	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing	90,90	Sangat Berhasil
3.	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup, Kewilayahan dan Mitigasi Bencana	96,55	Sangat Berhasil
4.	Mewujudkan Birokrasi Yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	109,14	Sangat Berhasil
RATA-RATA CAPAIAN			Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Pemprov NTT selama Tahun 2024 dikategorikan **Sangat Berhasil**. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian target 75 (*tujuh puluh lima*) indikator kinerja, 16 (*enam belas*) sasaran dari 4 (empat) Tujuan.

3.3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan memuat tentang analisis penggunaan sumber daya keuangan yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Efektivitas penggunaan anggaran

1. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi enggaran belanja dengan Target anggaran belanja. Menurut keputusan Menteri dalam negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, penentuan kriteria tingkat efektivitas belanja sebagai berikut:
 - a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%,maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
 - b. Jika pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif
 - c. Jika pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif
 - d. Jika pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif
 - e. Jika pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.



Tabel
Analisis Efektifitas Penggunaan Anggaran Pada 34 Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi Tahun 2024

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Ket
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2,065,557,341,686.00	2,038,151,087,186.90	98.67	Efektif
2	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	338,532,780,682.00	250,891,700,665.13	74.11	Cukup Efektif
3	Dinas Kesehatan	197,528,016,710.00	185,967,568,612.09	94.15	
4	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5,636,094,101.00	1,554,133,316.00	27.57	Cukup Efektif
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	184,280,898,624.00	165,051,740,763.00	89.57	Cukup Efektif
6	Satuan Polisi Pamong Praja	11,632,976,930.00	10,789,363,929.00	92.75	Cukup Efektif
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6,876,405,546.00	6,489,147,806.00	94.37	Kurang Efektif
8	Dinas Sosial	69,778,653,677.00	54,319,543,610.00	77.85	Kurang Efektif
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8,628,520,883.00	7,791,557,818.00	90.30	Cukup Efektif
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	102,207,600,783.00	92,556,741,846.00	90.57	Cukup Efektif
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9,306,216,908.00	8,331,565,171.00	89.53	Cukup Efektif
12	Dinas Perhubungan	40,917,744,212.00	37,292,866,835.00	91.14	Cukup Efisien
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	15,697,624,614.00	14,232,089,533.00	90.66	Efektif
14	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17,548,682,103.00	16,912,173,097.00	96.37	Kurang Efektif
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9,615,756,908.00	8,839,290,998.00	91.93	Cukup Efektif
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	35,150,497,235.00	30,494,644,063.00	86.75	Cukup Efektif
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10,933,319,656.00	10,128,598,836.00	92.64	Ekurang Efektif
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	47,151,572,967.00	44,466,859,039.00	94.31	Efektif
19	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10,435,071,360.00	9,936,468,983.00	95.22	Kurang Efektif
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	58,710,915,102.00	53,393,832,571.00	90.94	Kurang Efektif
21	Dinas Peternakan	25,061,234,853.00	22,012,591,462.00	87.84	Kurang Efektif
22	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	105,262,898,120.00	101,118,689,325.00	96.06	Efektif
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20,771,496,520.00	18,587,017,966.00	89.48	Kurang Efektif
24	Sekretariat Daerah	107,023,633,233.00	95,359,367,373.00	79.73	Kurang Efektif
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	149,453,576,207.00	127,338,959,986.00	85.20	Kurang Efektif
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	23,424,785,051.00	18,438,585,580.00	78.71	Kurang Efektif
27	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	86,717,206,669.00	75,435,669,868.00	80.99	Kurang Efektif
28	Badan Keuangan Daerah	948,192,059,569.00	825,536,290,229.00	87.06	Cukup Efisien



No	SKPD	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Ket
29	Badan Kepegawaian Daerah	12,919,713,000.00	12,225,724,670.00	94.63	Kurang Efektif
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	20,624,014,536.00	16,544,624,607.00	80.22	Kurang Efektif
31	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6,679,526,840.00	5,835,357,977.00	87.36	Kurang Efektif
32	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	11,072,012,200.00	10,524,582,818.00	95.06	Efektif
33	Inspektorat Daerah	19,430,320,869.00	18,169,544,142.00	93.51	Kurang Efektif
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	362,956,754,088.00	314,887,040,625.00	86.76	Kurang Efektif
JUMLAH		5.145.715.922.442,00	4.709.605.021.305,13	87.41	Efektif

2. Efisiensi penggunaan anggaran

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total anggaran belanja. Menurut keputusan Menteri dalam negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, penentuan kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

- a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
 - b. Jika pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja kurang efisien.
 - c. Jika pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien
 - d. Jika pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien
- Jika pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien

Tabel
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada 33 Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi Tahun 2024

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Ket
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2,090,539,255,771.00	1,984,638,449,106.90	94.93	Cukup Efisien
2	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	371,328,954,752.00	308,211,973,820.37	83.00	Cukup Efisien
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	206,252,782,874.00	173,028,779,243.00	83.89	Cukup Efisien
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	233,457,555,317.00	200,553,416,666.00	85.91	Cukup Efisien
5	Satuan Polisi Pamong Praja	13,708,942,700.00	11,352,634,994.00	82.81	Cukup Efisien
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10,368,652,200.00	7,139,578,376.00	68.86	Efisien
7	Dinas Sosial	71,687,285,572.00	50,115,304,710.00	69.91	Efisien
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6,892,432,255.00	5,627,308,146.00	81.64	Cukup Efisien
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	99,979,559,782.00	87,629,909,646.00	87.65	Cukup Efisien
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9,051,591,780.00	7,401,465,357.00	81.77	Cukup Efisien



No	SKPD	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Ket
11	Dinas Perhubungan	22,077,936,280.00	19,894,358,340.00	90.11	Cukup Efisien
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	13,590,100,235.00	12,662,309,049.00	93.17	Cukup Efisien
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31,422,755,876.00	24,365,608,710.00	77.54	Efisien
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7,965,030,448.00	7,088,720,956.00	89.00	Cukup Efisien
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	26,986,859,014.00	24,152,969,644.00	89.50	Cukup Efisien
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15,164,712,248.00	10,329,912,174.00	68.12	Efisien
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	51,579,537,247.00	47,152,417,645.00	91.42	Cukup Efisien
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10,521,011,760.00	8,322,815,279.00	79.11	Efisien
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	74,720,980,332.00	65,374,470,056.00	87.49	Cukup Efisien
20	Dinas Peternakan	28,972,514,344.00	25,171,224,457.00	86.88	Cukup Efisien
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	103,759,651,444.00	98,660,648,111.00	95.09	Cukup Efisien
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12,185,712,848.00	9,062,951,522.00	74.37	Efisien
23	Sekretariat Daerah	116,039,508,855.00	97,344,492,340.50	83.89	Cukup Efisien
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	147,365,956,040.00	132,195,746,389.00	89.71	Cukup Efisien
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	18,586,954,290.00	14,029,735,446.00	75.48	Efisien
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	85,317,757,937.00	74,921,430,177.00	87.81	Cukup Efisien
27	Badan Keuangan Daerah	760,988,379,960.00	747,373,878,616.00	98.21	Cukup Efisien
28	Badan Kepegawaian Daerah	12,209,004,680.00	10,829,748,522.00	88.70	Cukup Efisien
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	26,207,008,870.00	21,529,402,310.00	82.15	Cukup Efisien
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5,896,135,120.00	5,041,963,134.00	85.51	Cukup Efisien
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	7,953,516,550.00	7,394,721,334.00	92.97	Cukup Efisien
32	Inspektorat Daerah	18,655,098,580.00	14,198,502,163.00	76.11	Efisien
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	184,352,330,860.00	148,180,194,029.00	80.38	Cukup Efisien
JUMLAH		4,895,785,466,821.00	4,460,977,040,468.77	91.12	Cukup Efisien

